

No. Reg: 201070000037560

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS RELIGIUSITAS KE-ISLAMAN (*ISLAMIC RELIGIOSITY*), PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI EMPIRIS KABUPATEN KOTA DI ACEH)

Ketua Peneliti

Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN: 0106077507
ID Peneliti: 010607750702000

Anggota:

A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN: 2025027902

Klaster	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020

**LEMBAR PENYERAHAN LUARAN DAN ATAU OUTPUT
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH ATAU PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PADA PUSLITPEN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA
ACEH TAHUN 2020**

NO.	IDENTITAS	URAIAN
1	Nama Ketua Peneliti	Khairul Amri, SE., M.Si
2	NIDN	0106077507
3	ID Peneliti	010607750702000
3	Nama Anggota Peneliti	1. A. Rahmad Adi, SE., M.Si
4	Klaster	Penelitian Dasar Interdisipliner
5	Nomor Registrasi	201070000037560
6	Judul Laporan	Analisis religiusitas ke-islaman (<i>islamic religiosity</i>), pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan (studi empiris kabupaten kota di Aceh)
7	Jumlah Halaman	86
8	Judul Draft Artikel/Buku (<i>Bukan Judul Penelitian</i>)	Pengaruh Religiusitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel Kabupaten Kota di Aceh
8	Jumlah Halaman	13
9	Capaian Luaran	1. Laporan Penelitian/ Laporan Kegiatan/ Laporan Pengabdian* (<i>wajib sesuai juknis dan kontrak</i>) 2. HKI (<i>wajib sesuai juknis dan kontrak</i>) 3. Publikasi Jurnal (<i>wajib sesuai Juknis dan Kontrak</i>)
10	Rencana Publikasi pada (<i>Tulis Kategori Jurnal luaran atau penerbit buku sesuai Juknis dan Kontak</i>)**	Contoh: Jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis terindek Sinta 3, DOAJ
11	HKI***	1. Nomor Permohonan: 2. Nomor Pencatatan: 3. Pengajuan Ciptaan dilakukan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

* *Pilih Sesuai Kategori Kegiatan*

***Bukti fisik artikel dan atau buku yang dipublikasikan wajib diserahkan ke puslitpen dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan juknis.*

****Di isi oleh pihak Puslitpen berdasarkan list daftar dari pihak Sentra HKI UINAR.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020
Peneliti,



(Khairul Amri, SE., M.Si)

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Analisis religiusitas ke-islaman (*islamic religiosity*), pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan (studi empiris kabupaten kota di Aceh)
- b. Klaster : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 20107000037560
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi Syariah
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Khairul Amri, SE., M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Lak-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) :
 - d. NIDN : 0106077507
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 010607750702000
 - f. Pangkat/Gol. : IIIc
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : A. Rahmat Adi, SE., M.Si
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :
3. Lokasi Kegiatan :
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp40.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana,



Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Khairul Amri, SE., M.Si**
NIDN : 0106077507
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Pagu, 6 Juli 1975
Alamat : Jl. Teuku Nyak Arif, Pasar Lamnyong
No. B7, Lamgugop, Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"ANALISIS RELIGIUSITAS KE-ISLAMAN (ISLAMIC RELIGIOSITY), PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI EMPIRIS KABUPATEN KOTA DI ACEH)"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Interdisiplinier yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

ANALISIS RELIGIUSITAS KE-ISLAMAN (*ISLAMIC RELIGIOSITY*), PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI EMPIRIS KABUPATEN KOTA DI ACEH)

Ketua Peneliti:

Khairul Amri, SE., M.Si

Anggota Peneliti:

A. Rahmat Adi, SE., M.Si

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara religiusitas keislaman dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Religiusitas keislaman yang dimaksudkan diproksi dari tiga dimensi yakni jumlah mesjid, pesantren dan santri. Menggunakan data panel 23 kabupaten kota di Aceh selama periode tahun 2010-2017, model analisis yang digunakan adalah *panel vector autoregressive* (PVAR) dan *Granger causality test*. Penelitian mengemukakan bahwa di daerah dengan ketimpangan tinggi, ketiga dimensi religiusitas tersebut tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Tetapi masing-masing dimensi berpengaruh berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan mesjid berpengaruh positif, sedangkan pesantren berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap religiusitas ke-islaman. Di daerah dengan ketimpangan rendah, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan religiusitas keislaman. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap perkembangan jumlah pesantren dan santri, tetapi berpengaruh negatif terhadap perkembangan jumlah mesjid. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang ambigu terhadap perkembangan jumlah santri. Dalam horizon waktu dua periode, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, sebaliknya dalam horizon waktu tiga periode pengaruh tersebut positif. Di daerah dengan ketimpangan tinggi, terdapat kausalitas satu arah (*unidirectional causality*) dari ketimpangan pendapatan ke religiusitas keislaman, dan kausalitas dua arah (*bidirectional causality*) antara pertumbuhan ekonomi dan religiusitas keislaman. Sementara di daerah dengan ketimpangan rendah, kausalitas satu arah (*unidirectional causality*) terjadi dari ketimpangan pendapatan ke pertumbuhan ekonomi dan ke dua dimensi religiusitas yakni jumlah pesantren dan jumlah santri.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi; Ketimpangan Pendapatan; Religiusitas Keislaman; Panel VAR; Granger Causality Test*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Analisis religiusitas ke-islaman (*islamic religiosity*), pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan (studi empiris kabupaten kota di aceh)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Sejumlah pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengumpulan data penelitian, baik data sekunder maupun data primer yang dibutuhkan dalam melengkapi laporan ini.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khairul Amri', with a horizontal line extending to the right.

Khairul Amri, SE., M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Sistematika Penulisan Laporan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pertumbuhan Ekonomi	13
B. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi.....	14
C. Ketimpangan Pendapatan.....	19
D. Religiusitas Ke-Islaman.....	21
E. Keterkaitan Religiusitas dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	22
F. Keterkaitan Religiusitas dan Ketimpangan Pendapatan	23
G. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan.....	23
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Batasan Penelitian	27
B. Metode dan Desain Penelitian.....	27
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Operasional Variabel	28
E. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi.....	32
B. Deskripsi Perkembangan Ketimpangan Pendapatan	34
C. Deskripsi Perkembangan Religiusitas Keislaman.	36
D. Hasil Statistik Deskriptif.....	42
E. Hasil Uji Akar Unit	53
F. Hasil Uji Kointegrasi.....	55
G. Hasil Lag Optimum	56
H. Hasil Panel Vector Autoregressive.....	57
I. Analisis Kausalitas Antar variabel	65
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	76
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	43
Tabel 2.	Ringkasan hasil uji akar unit.....	54
Tabel 3.	Hasil Pedroni's co-integration test	56
Tabel 4.	Hasil penentuan lag optimum	57
Tabel 5.	Ringkasan PVAR untuk daerah dengan ketimpangan tinggi.....	60
Tabel 6.	Ringkasan PVAR untuk daerah dengan ketimpangan rendah.....	63
Tabel 7.	Ringkasan <i>Granger causality tests</i> daerah dengan ketimpangan tinggi.....	66
Tabel 8.	Ringkasan <i>Granger causality tests</i> daerah dengan ketimpangan rendah.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	<i>Scatter Diagram</i> antara Mesjid dan PDRB per kapita..	44
Gambar 4.2	<i>Scatter Diagram</i> antara Pesantren dan PDRB per kapita	45
Gambar 4.3	<i>Scatter Diagram</i> antara Santri dan PDRB per kapita ...	46
Gambar 4.4	<i>Scatter Diagram</i> antara Mesjid dan Gini rasio.....	48
Gambar 4.5	<i>Scatter Diagram</i> antara Pesantren dan Gini rasio	49
Gambar 4.6	<i>Scatter Diagram</i> antara Santri dan Gini rasio	50
Gambar 4.7	<i>Scatter Diagram</i> antara Gini rasio dan PDRB per kapita	51
Gambar 4.8	Arah kausalitas antar variabel di daerah dengan ketimpangan tinggi	67
Gambar 4.9	Arah kausalitas antar variabel di daerah dengan ketimpangan rendah.....	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	PDRB per kapita menurut kabupaten kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017 (Rp juta per tahun)	2
Grafik 1.2	Gini Rasio menurut kabupaten kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017	3
Grafik 1.3	Jumlah Masjid Menurut kabupaten kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017 (unit Per 10.000 jiwa penduduk)	5
Grafik 1.4	Jumlah Pesantren Menurut kabupaten kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017 (unit Per 20.000 jiwa penduduk)	6
Grafik 1.5	Jumlah Santri Menurut kabupaten kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017 (Orang Per 10.000 jiwa penduduk)	7
Grafik 4.1	Perkembangan PDRP Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Kabupaten Kota di Aceh Selama periode tahun 2010-2017	33
Grafik 4.2	Perkembangan Gini Rasio Menurut Kabupaten Kota di Aceh Selama periode tahun 2010-2017	35
Grafik 4.3	Perkembangan Jumlah Masjid Menurut Kabupaten Kota di Aceh Selama periode tahun 2010-2017	37
Grafik 4.4	Perkembangan Jumlah Pesantren Menurut Kabupaten Kota di Aceh Selama periode tahun 2010-2017	39
Grafik 4.5	Perkembangan Jumlah Santri Menurut Kabupaten Kota di Aceh Selama periode tahun 2010-2017	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian

Lampiran 2 Biodata Peneliti

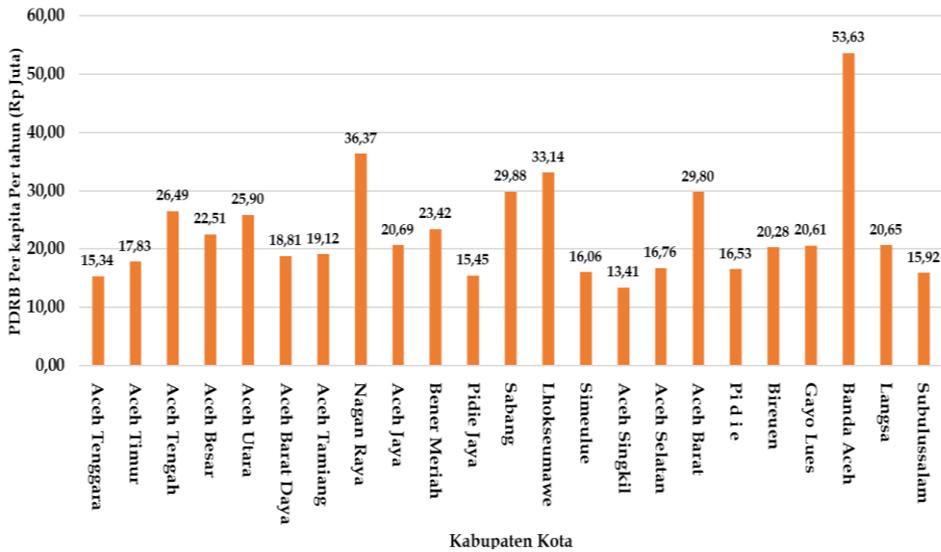
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat dideskripsikan sebagai perubahan positif dalam tingkat produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama periode waktu tertentu (Kanu & Ozuruma, 2014; Amri, 2017). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita daerah tersebut. PDRB per kapita yang relatif tinggi mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga tinggi.

Seiring dengan pembangunan ekonomi daerah di Aceh, pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten kota di daerah tersebut relatif berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari PDRB per kapita masyarakatnya. Menggunakan harga konstan tahun 2000, selama periode tahun 2017 daerah dengan PDRB per kapita paling tinggi adalah kota Banda Aceh sebesar Rp53,63 juta per per tahun. Kemudian menyusul kabupaten Nagan Raya di urutan kedua sebesar Rp36,37 juta per tahun. Kota Lhokseumawe dan Sabang berada pada urutan ke tiga dan keempat dengan PDRB per kapita per tahun masing-masing sebesar Rp33,14 juta dan Rp29,88 juta. Dalam periode tahun yang sama, daerah dengan PDRB per kapita paling rendah adalah Aceh Singkil sebesar Rp13,41 juta per tahun. Kemudian menyusul kabupaten Pidie Jaya di urutan berikutnya sebesar Rp14,45 juta per tahun, Aceh Tenggara sebesar Rp15,34 juta per tahun, dan kota Subulussalam Rp15,92 juta per tahun.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran PDRB per kapita kabupaten kota di Aceh dapat dilihat Grafik 1.1.

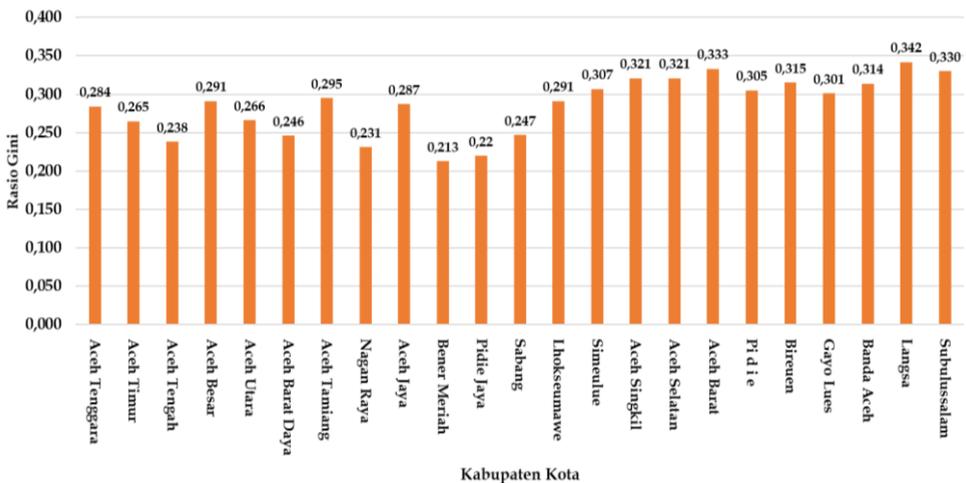


Grafik 1.1

PDRB per kapita menurut kabupaten kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017 (Rp juta per tahun)

Seiring dengan perbedaan pertumbuhan ekonomi yang direfleksikan melalui PDRB per kapita sebagaimana dijelaskan di atas, tingkat ketimpangan pendapatan di masing-masing daerah di Aceh juga berbeda. Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh Gini rasio masing-masing kabupaten kota. Gini rasio pada dasarnya merupakan rasio persentase akumulasi pendapatan yang diterima sekelompok penduduk dalam suatu perekonomian terhadap persentase jumlah penduduk. Ketika sebagian besar akumulasi pendapatan hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, maka Gini rasio akan relatif lebih besar. Peningkatan Gini rasio mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata (ketimpangan semakin tinggi). Sebaliknya, penurunan Gini rasio berarti distribusi pendapatan semakin merata (ketimpangan semakin rendah). Pada tahun 2017 daerah dengan tingkat ketimpangan paling

tinggi adalah kota Langsa dengan Gini rasio sebesar 0,342. Kemudian menyusul Aceh Barat dan kota Subulussalam dengan Gini rasio masing-masing sebesar 0,333 dan 0,330. Di urutan berikutnya terdapat Aceh Singkil dan Aceh Selatan masing-masing sebesar 0,321, Bireuen sebesar 0,315 dan Kota Banda Aceh dengan Gini rasio sebesar 0,314. Dalam periode tahun yang sama, daerah dengan ketimpangan paling rendah adalah kabupaten Bener Meriah dengan Gini rasio sebesar 0,213. Kemudian menyusul Kabupaten Pidie Jaya, Nagan Raya dan kabupaten Aceh Tengah dengan Gini rasio masing-masing sebesar 0,220; 0,231 dan 0,238. Deskripsi Gini rasio masing-masing kabupaten kota di Aceh seperti ditunjukkan dalam Grafik 1.2.



Grafik 1.2

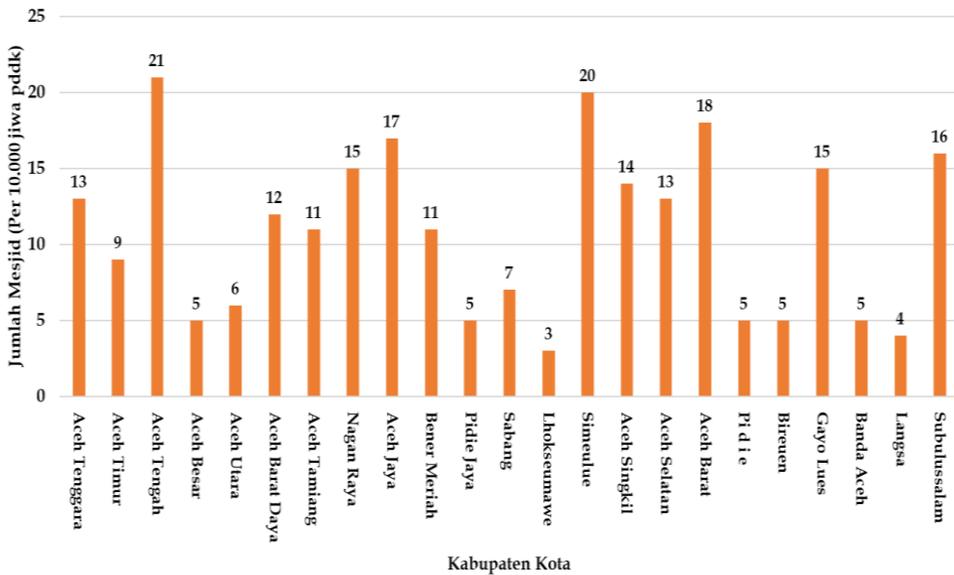
Gini Rasio menurut kabupaten kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017

Adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan masing-masing kabupaten kota di Aceh dapat dikaitkan dengan banyak faktor baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Hal ini disebabkan perilaku dan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi terkait secara langsung dengan kedua faktor tersebut. Faktor ekonomi seperti ketersediaan modal dan tenaga kerja misalnya secara langsung merupakan faktor penentu kemampuan produksi.

Sedangkan faktor non ekonomi seperti lingkungan sosial budaya, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta faktor non ekonomi lainnya termasuk peraturan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat juga berdampak terhadap perkembangan usaha masyarakat. Dalam kajian ini, faktor non ekonomi yang dimaksudkan dibatasi pada faktor keagamaan (religiusitas). Religiusitas didefinisikan sebagai kepatuhan seseorang yang menganut agama tertentu terhadap nilai-nilai keagamaan, keyakinan dan ritual yang dilakukannya sesuai dengan aturan agama tersebut. Religiusitas yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah religiusitas keislaman yakni komitmen atau ketetapan hati seseorang muslim dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam (Makros & McCabe, 2003; Aji, 2018). Pengukuran religiusitas keislaman masyarakat muslim dapat menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan keyakinan (*islamic beliefs*) dan praktik perilaku. Jana-Masri & Priester (2007) dan Abu Raiya et al. (2008) menggunakan sejumlah indikator dalam mengukur religiusitas keislaman antara lain kepatuhan muslim dalam melaksanakan ibadah shalat termasuk shalat berjamaah di mesjid, membaca al-quran, puasa di bulan ramadhan, naik haji, membayarkan zakat dan merayakan idul fitri dan idul adha.

Kajian tentang keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dengan religiusitas keislaman sangat menarik dalam konteks daerah Aceh. Apalagi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang 95 persen lebih penduduknya beragama Islam. Hampir sama dengan sejumlah peneliti di atas, pengukuran religiusitas ke-islaman dalam kajian ini didekati dengan pengukuran kuantitatif dengan menggunakan tiga dimensi yakni jumlah mesjid, institusi keagamaan termasuk lembaga pendidikan non formal seperti pasantren/dayah dan jumlah santri. Penggunaan institusi keagamaan sebagai indikator pengukuran religiusitas suatu daerah juga didukung oleh pendapat Wang & Lin (2014) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas suatu daerah dapat diproksi dari jumlah institusi keagamaan di daerah tersebut (Wang & Lin, 2014).

Hasil kajian awal berdasarkan dokumentasi terhadap data yang berkaitan dengan tiga dimensi religiusitas keislaman tersebut mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas masyarakat di Aceh relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan jumlah mesjid, pesantren dan santri masing-masing daerah. Berdasarkan dimensi mesjid, hingga tahun 2017 daerah dengan jumlah mesjid paling banyak adalah Aceh Tengah yakni sebanyak 21 unit per 10.000 jiwa penduduk. Kemudian menyusul Simeulue dan Aceh Barat dengan jumlah mesjid masing-masing sebanyak 20 dan 18 unit per 10.000 jiwa penduduk. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah mesjid menurut kabupaten kota di Aceh selama periode tahun 2017 ditunjukkan dalam Grafik 1.3.



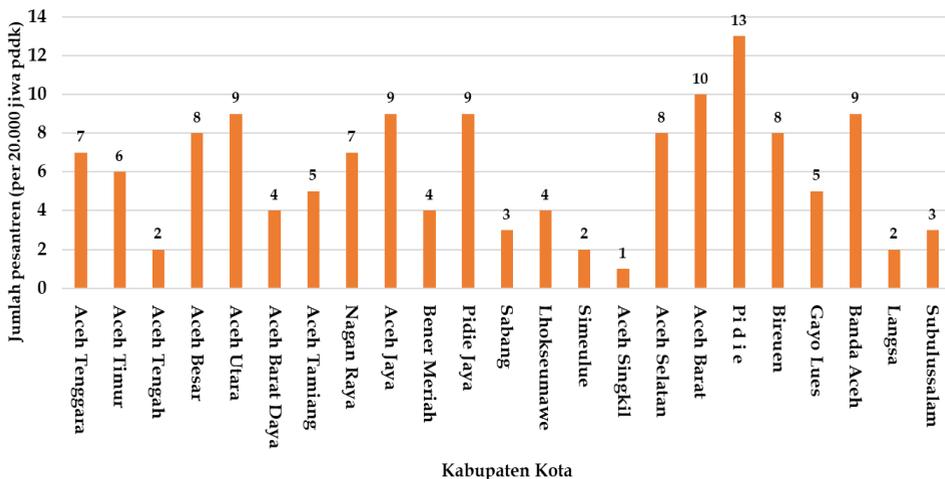
Grafik 1.3

Jumlah Mesjid Menurut kabupaten kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017 (unit Per 10.000 jiwa penduduk)

Dalam tahun yang sama, daerah dengan mesjid paling sedikit adalah kota Lhokseumawe dan Langsa masing-masing 3 dan 4 unit per

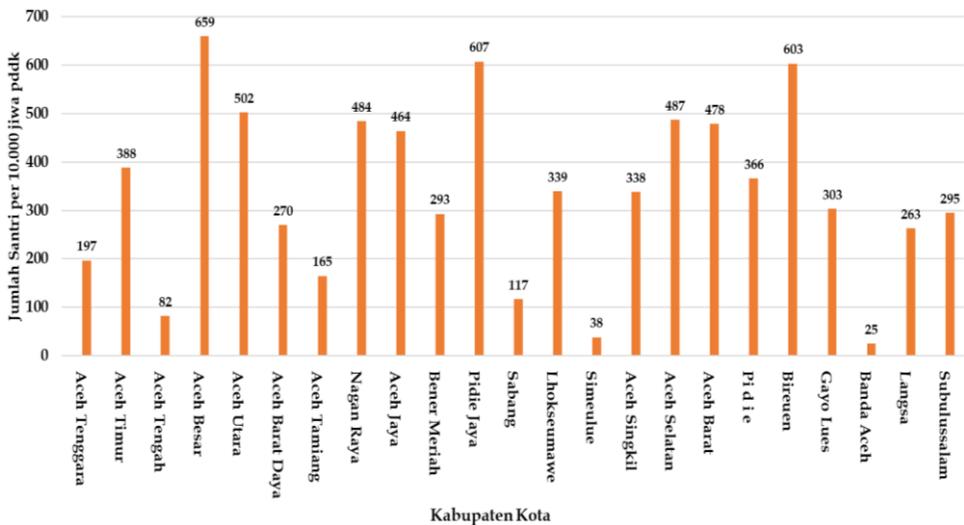
10.000 jiwa penduduk, kemudian menyusul Bireuen, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Besar dengan jumlah mesjid masing-masing 5 unit per 10.000 jiwa penduduk.

Seiring dengan adanya perbedaan jumlah mesjid, eksistensi lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah pesantren juga relatif berbeda berdasarkan daerah. Hingga tahun 2017, daerah dengan jumlah pesantren paling banyak adalah Pidie dan Aceh Barat masing-masing sebanyak 13 unit dan 10 unit per 20.000 jiwa penduduk. Kemudian menyusul Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Utara dan kota Banda Aceh diurutan ketiga dengan jumlah pesantren masing-masing 9 unit per 20.000 jiwa penduduk. Sebaliknya, daerah dengan pesantren paling sedikit adalah Aceh Singkil, hanya 1 unit pesantren per 20.000 jiwa penduduk. Di urutan berikutnya terdapat Langsa, Simeulue dan Aceh Tengah. Jumlah pesantren di tiga daerah tersebut masing-masing sebanyak 2 unit per 20.000 jiwa penduduk. Grafik 1.4 memperlihatkan jumlah pesantren berdasarkan kabupaten kota di Aceh.



Grafik 1.4
Jumlah Pesantren Menurut kabupaten kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017 (unit Per 20.000 jiwa penduduk)

Berdasarkan dimensi santri sebagai ukuran religiusitas keislaman, diperoleh ukuran kuantitatif bahwa tingkat religiusitas masing-masing daerah juga relatif berbeda. Santri yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jumlah santri per 10.000 jiwa penduduk. Hingga tahun 2017, daerah dengan jumlah santri paling besar adalah Aceh Besar dengan santri sebanyak 629 orang per 10.000 jiwa penduduk. Kemudian menyusul Pidie Jaya dan Bireuen di urutan kedua dan ketiga dengan santri sebanyak 607 orang dan 603 orang per 10.000 jiwa penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Islam di tiga daerah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Aceh. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah santri berdasarkan kabupaten kota di Aceh selama periode tahun 2017 dapat dilihat Grafik 1.5.



Grafik 1.5

Jumlah Santri Menurut kabupaten kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017 (Orang Per 10.000 jiwa penduduk)

Grafik 1.5 di atas menginformasikan bahwa daerah dengan jumlah santri paling sedikit adalah Banda Aceh yakni sebanyak 25 orang per

10.000 jiwa penduduk. Kemudian menyusul Simeulue dan Aceh Tengah masing-masing 38 orang dan 82 orang santri per 10.000 jiwa penduduk. Data kuantitatif ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat di tiga daerah tersebut untuk mendalami ajaran keislaman melalui pesantren relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Data berkaitan dengan tiga dimensi pengukuran religiusitas keislaman (mesjid, pesantren dan santri) seperti dijelaskan di atas merupakan sinyalemen kuantitatif untuk menafsirkan adanya perbedaan religiusitas keislaman antar daerah kabupaten kota di Aceh. Perbedaan tersebut tentunya dapat berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Sebab, religiusitas keagamaan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena kepercayaan pada agama mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menjalankan aktifitas mereka termasuk dalam kegiatan ekonomi (Wang & Lin, 2014).

Kajian mengenai keterkaitan religiusitas dengan pertumbuhan ekonomi sudah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Namun kesimpulan yang mereka peroleh masih kontroversial. Artinya belum ada suatu kesimpulan yang sama mengenai arah hubungan antara kedua variabel tersebut. Hasil kajian Casimier et al. (2014) menyimpulkan bahwa dimensi religiusitas berpengaruh positif terhadap variabel sosial ekonomi. Temuan tersebut konsisten dengan hasil kajian Wang & Lin (2014) yang menyajikan bukti empiris bahwa tingkat religiusitas keagamaan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena kepercayaan pada agama mempengaruhi preferensi politik, *human capital* dan etika kerja. Berbeda dengan temuan kedua peneliti tersebut, hasil penelitian (Campante & Yanagizawa-Drot (2013) menyimpulkan bahwa dalam masyarakat muslim, praktek keagamaan mempengaruhi pilihan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat

dan memiliki implikasi negatif terhadap kinerja perekonomian (Campante & Yanagizawa-Drot, 2013).

Hasil kajian empiris mengenai keterkaitan antara religiusitas dan ketimpangan pendapatan juga masih menunjukkan hasil berbeda. Hubungan antara kedua variabel tersebut masih sulit untuk dipahami (Keister & Eagle, 2016). Sebelumnya Elgin et al. (2013) dalam penelitian mereka menyimpulkan adanya hubungan positif antara tingkat religiusitas dengan ketimpangan pendapatan. Daerah dengan tingkat religiusitas tinggi ketimpangan pendapatan juga tinggi. Sebaliknya daerah dengan religiusitas rendah memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Temuan lainnya mengenai keterkaitan antara kedua variabel tersebut seperti dikemukakan oleh Matteo (2015) yang menemukan bahwa hubungan antara ketimpangan ekonomi dan religiusitas relatif lemah.

Adanya perbedaan temuan empiris mengenai keterkaitan antara religiusitas dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan seperti dijelaskan di atas merupakan kesenjangan empiris (*empirical gap*) yang secara akademis perlu diteliti lebih lanjut. Apalagi dalam konteks Aceh yang secara umum penduduknya beragama Islam. Adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di masing-masing kabupaten kota, mendorong pentingnya mengaitkan kedua variabel tersebut dengan tingkat religiusitas ke-Islaman (*Islamic religiosity*) masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Penduduk Aceh pada umumnya beragama islam, sehingga seluruh perilaku dan tindakan mereka dalam segala aspek kehidupan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma- norma yang diatur dalam ajaran Islam. Intensitas internalisasi nilai dan norma keislaman dalam kehidupan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat

religiusitas masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Hasil analisis awal mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas keislaman (*Islamic religiosity*) masing-masing daerah di Aceh relatif berbeda satu sama lain. Indikasi ini didasarkan pada ukuran kuantitatif di antaranya jumlah rumah ibadah (mesjid), pasantren dan dayah sebagai institusi pendidikan non formal serta rasio santri terhadap jumlah penduduk.

Tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah kabupaten kota di Aceh relatif berbeda satu sama lain. Di satu sisi terdapat kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan relatif tinggi, dan disisi lain juga terdapat daerah dengan pertumbuhan ekonomi relatif rendah. Demikian pula halnya dengan ketimpangan pendapatan. Beberapa daerah mengalami ketimpangan pendapatan yang rendah, dan hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di masyarakatnya relatif merata. Namun di sisi lain juga terdapat daerah dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut secara spesifik yang menjadi masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan religiusitas, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan kabupaten kota di Aceh, dan;
2. Apakah terdapat kausalitas antara religiusitas, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan kabupaten kota di Aceh.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan religiusitas, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan kabupaten kota di Aceh, dan
2. Menganalisis hubungan kausalitas antara religiusitas, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan kabupaten kota di Aceh.

D. Sistematika penulisan

Secara sistematis, laporan ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama berkaitan dengan pendahuluan yang menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian. Bagian kedua adalah landasan teoritis. Pada bagian ini, dikemukakan sejumlah teori yang dianggap relevan bagi kepentingan penelitian. Penyajian teori selain dimaksudkan untuk mendeskripsikan konsep teoritis masing-masing variabel seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan tingkat religiusitas ke-islaman serta pengukurannya, juga menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel lainnya tidak hanya didasarkan pada buku teks, tetapi juga diperkuat oleh hasil penelitian empiris yang telah dilakukan oleh para peneliti di sejumlah negara.

Bagian ketiga adalah metode penelitian. Bagian ini terdiri dari sejumlah sub bab meliputi batasan penelitian, metode desain penelitian, jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel yang disertai dengan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel, dan teknik analisis data.

Bagian keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini mendeskripsikan mendeskripsikan temuan penelitian berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan religiusitas masing-masing kabupaten kota di Aceh. Selain itu, kajian terhadap signifikansi keterkaitan antar variabel-variabel tersebut serta arah kausalitas masing-masing variabel juga disajikan dan dianalisis dalam bagian ini.

Bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Bab ini berisi informasi mengenai kesimpulan, saran dan rekomendasi penelitian. Implikasi penelitian baik bagi pengambil kebijakan maupun peneliti

selanjutnya yang tertarik meneliti keterkaitan antara religiusitas keislaman dengan variabel makro ekonomi lainnya juga disajikan pada bagian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2006:99). Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar (Pressman, 2000:77).

Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Pengertian pertumbuhan yang dimaksud adalah tanpa memandang kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak (Arsyad, 2009:191). Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi ketika pendapatan masyarakatnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebaliknya, ketika pendapatan masyarakat mengalami penurunan, maka ekonomi dikatakan tidak tumbuh. Sehingga dalam konteks wilayah seperti halnya kabupaten kota, pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan pendapatan masyarakatnya pada periode tahun tertentu dengan periode tahun sebelumnya.

Dalam kajian ini, pendapatan yang dimaksudkan adalah pendapatan per kapita, yakni total pendapatan yang diterima masyarakat secara keseluruhan yang biasanya tercermin dari total produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten kota dibagi dengan jumlah penduduk pada periode tahun yang sama. Penggunaan PDRB per kapita sebagai

ukuran pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh sejumlah peneliti (Amri, 2018; Hasyim et al., 2019; Amri et al., 2019).

B. Teori pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya upaya meningkatkan kapasitas pertumbuhan daerah sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi tingginya, pembangunan harus pula berupaya menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran atau upaya untuk menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro & Smith, 2006).

Istilah pertumbuhan ekonomi sering didefinisikan oleh para ahli dengan istilah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita, tetapi biasanya istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju dan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Tetapi tidak berarti kenaikannya secara terus menerus. Suatu perekonomian akan dapat mengalami penurunan dalam tingkat kegiatan ekonominya apabila terjadi resesi ekonomi, kekacauan politik dan penurunan ekspor. Tetapi jika keadaan

demikian hanya bersifat sementara, kegiatan ekonomi meningkat secara rata-rata dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapat lah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.

Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi, masing-masing teori mengemukakan faktor-faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan tersebut (Arsyad 2009:39). Namun dalam penelitian ini, teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan hanya terdiri dari teori pertumbuhan Harrod-Domar, Solow-Swan dan teori pertumbuhan endogen.

a. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkan oleh Evsey Domar dan Harrod. Teori ini mengembangkan analisis Keynes dengan masalah-masalah ekonomi jangka panjang, serta berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*). Harrod-Domar mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau *steady growth* dalam jangka panjang di dalam pertumbuhan mantap semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi, masing-masing tumbuh secara konstan atau pada laju yang lurus secara eksponensial (Jhingan, 2013:377).

Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yaitu:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.

3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio modal-output (*capital-output ratio* = COR) dan rasio pertambahan modal output (*incremental capital-output ratio* = ICOR).

Menurut Harrod-Domar setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan dan material) yang rusak. Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi yang baru sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai rasio modal output tersebut, hubungan ini dikenal dengan istilah rasio modal-output (COR).

b. Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkan oleh Robert Solow. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (*capital-output ratio* = COR) dapat berubah dan bersifat dinamis. Untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan maka

tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan output tertentu.

Teori pertumbuhan Solow-Swan menggunakan pendekatan fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Cobb dan Douglas yang dikenal dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi tersebut dituliskan dalam persamaan berikut.

$$Q_t = T_t \cdot K_t^a \cdot L_t^b$$

Di mana:

Q_t : Tingkat produksi pada tahun t

T_t : Tingkat teknologi pada tahun t

K_t : Jumlah stok barang modal pada tahun t

L_t : Jumlah tenaga kerja pada tahun t

a : Pertambahan *output* yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

b : Pertambahan *output* yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Nilai T_t , a dan b bisa diestimasi secara empiris, tetapi pada umumnya nilai a dan b ditentukan besarnya dengan menganggap bahwa $a + b = 1$ yang berarti bahwa a dan b nilainya adalah sama dengan produksi batas masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai a dan b ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output.

c. Teori Pertumbuhan Endogen

Munculnya teori pertumbuhan endogen disebabkan adanya kelemahan pada teori pertumbuhan Solow. Model pertumbuhan ini, memasukkan aspek-aspek endogenitas dan eksternalitas di dalam proses

pembangunan ekonomi. Salah satu asumsinya adalah variabel teknologi tidak lagi tetap melainkan bersifat dinamis. Begitu pula halnya dengan tenaga kerja (L). Variabel L tidak lagi merupakan variabel eksogen, tetapi bisa berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Kemajuan Iptek dan sumber daya manusia menjadi sumber peningkatan produktivitas dari input-input yang digunakan dalam proses produksi.

Menurut Todaro & Smith (2006), dalam teori pertumbuhan endogen faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan selain K dan L juga teknologi, kewirausahaan, bahan baku dan material. Selain itu juga ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan dasar tukar internasional (*term of trade*). Pentingnya faktor faktor tersebut bisa dilihat dari berbagai kasus yang terdapat di Afrika, khususnya di Sub-Sahara Afrika. Di negara-negara tersebut, pembangunan ekonomi terhenti diantaranya karena kualitas tenaga kerja yang sangat rendah, politik yang tidak stabil, peperangan, defisit keuangan pemerintah dan keterbatasan infrastruktur.

d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori pertumbuhan ekonomi modern diperolopori oleh Simon Kuznets (1971). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Kuznets memisahkan 6 karakteristik proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju. Karakteristik pertama dan kedua berkaitan dengan dua variabel ekonomi agregatif yaitu tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk, dan tingginya keahlian produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja. Karakteristik ketiga dan keempat berkaitan dengan variabel transformasi struktural yaitu tingginya tingkat

transformasi struktur ekonomi dan tingkat transformasi sosial dan ideologi. Selanjutnya karakteristik kelima dan ke enam berkaitan dengan kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku dan pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia (Jhingan, 2013).

C. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi. Perbedaan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang analog dengan kesenjangan sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan.

Terdapat sejumlah metode dan kriteria yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan terdiri dari kurva Lorenz, indeks Gini yang lebih dikenal dengan Gini rasio, kriteria Bank Dunia, Indeks Williamson dan teori Kutnez. Masing-masing metode dan kriteria tersebut sebagai berikut.

1. Kurva Lorenz,

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata.

Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

2. Indeks Gini

Gini atau lengkapnya Corrado Gini merumuskan suatu ukuran untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan personal secara agregatif yang diterima diatas tingkat tertentu. Hasil temuannya sering disebut sebagai *gini coefficient* atau indeks gini.

3. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia yang bekerjasama dengan *Institute of Development Studies* menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan, apakah dalam keadaan ketimpangan yang parah, sedang, atau ringan.

4. Indeks Williamson

Indeks Williamson ini diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson (1965), penghitungan nilai ini didasarkan pada indeks variasi (CV) dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbangannya dengan proporsi penduduk wilayah.

5. Teori Kuznets

Kuznets (1969) dalam analisisnya mengenai pola sejarah pertumbuhan negara-negara maju, menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, sedangkan pada tahap selanjutnya cenderung membaik.

Dalam kajian ini, pengukuran ketimpangan pendapatan kabupaten kota di Aceh menggunakan Gini rasio. Peningkatan rasio ini berarti ketimpangan pendatan semakin meningkat. Sebaliknya, penurunan gini rasio mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata dan ketimpangan pendapatan menurun (Todaro & Smith, 2006). Penggunaan gini rasio dalam mengukur ketimpangan pendapatan dalam kontek perekonomian daerah didukung oleh sejumlah peneliti (Das et al., 2014; Crudu, 2015; Nazamuddin & Amri, 2020).

D. Religiusitas Ke-Islaman

Religiusitas dapat didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan seseorang terhadap nilai-nilai religius, keyakinan serta ritual yang dilakukan dalam kaitannya dengan agama yang dianutnya. Religiusitas keislaman adalah komitmen seseorang muslim untuk melaksanakan ajaran islam yang direfleksikan dalam bentuk keyakinan dan perbuatan (Aji, 2018). Religiusitas ke-islaman seseorang muslim dapat diukur melalui dua pendekatan yakni keyakinan (*islamic beliefs*) dan praktik perilaku yang sesuai dengan ajaran islam (Makros & McCabe, 2003). Dari segi praktik perilaku, indikator yang digunakan untuk mengukur religiusitas tersebut antara lain shalat lima waktu, pergi ke mesjid, membaca al-quran, puasa di bulan ramadhan, naik haji, membayarkan zakat dan merayakan idul fitri dan idul adha (Jana-Masri & Priester, 2007). Abu Raiya et al. (2008) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa religiusitas keislaman dari berdasarkan praktik perilaku dapat diukur berdasarkan tingkat keseringan seseorang muslim datang ke mesjid, kepatuhan dalam melaksanakan ibadah shalat, puasa, dan membaca al-quran. Penelitian Lam & Mansouri (2020) tentang religiusitas pemuda muslim di Australia juga menggunakan indikator-indikator tersebut dalam mengukur religiusitas keislaman. Sebelumnya, Musa (2015) menyatakan bahwa perilaku religius seseorang muslim dapat diukur berdasarkan kepatuhannya dalam menjalankan ibadah shalat, pergi ke mesjid, membaca al-quran dan melaksanakan zikir.

Pengukuran religiusitas ke-islaman yang dilakukan oleh sejumlah peneliti di atas menggunakan pendekatan perilaku dalam konteks individual. Seperti kepatuhan melaksanakan ibadah shalat dan datang ke mesjid misalnya, religiusitas seseorang didasarkan pada indikator

tersebut. Dalam kajian ini, fokus analisis adalah religiusitas ke-islaman masyarakat secara umum. Karena itu, pengukuran religiusitas menggunakan pendekatan makro yakni jumlah mesjid, pesantren dan santri. Keberadaan mesjid di suatu daerah dijadikan refleksi dari tingkat kehadiran masyarakatnya dalam melaksanakan shalat berjamaah. Pesantren dan jumlah santri merefleksikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan islam. Karena itu dalam kaitannya dengan penelitian ini, peningkatan jumlah mesjid, pesantren dan santri mengindikasikan bahwa religiusitas meningkat. Sebaliknya, daerah dengan jumlah mesjid, pesantren dan santri relatif sedikit dianggap memiliki tingkat religiusitas keislaman yang lebih rendah dibandingkan daerah dengan jumlah mesjid, pesantren dan santri relatif lebih banyak.

E. Keterkaitan Religiusitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat religiusitas dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan nilai dan norma agama yang dianut oleh masyarakat menjadi acuan bagi mereka dalam bersikap dan berperilaku termasuk dalam kegiatan ekonomi. Seperti dikemukakan oleh Barro & McCleary (2001) bahwa keyakinan beragama secara langsung mempengaruhi perilaku individu yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pilihan individual dalam kegiatan konsumsi dan produksi. Penelitian Barro & McCleary (2003) menggunakan data lintas negara menemukan bahwa keyakinan religius (religious belief) mempengaruhi perilaku individu yang kemudian berdampak pada kinerja ekonomi secara umum.

Nilai keagamaan juga mempengaruhi pendidikan, kesehatan dan akumulasi modal manusia (Becker & Woessmann, 2009). Selanjutnya akumulasi modal merupakan determinan penting pertumbuhan ekonomi (Amri & Aimon, 2017). Hubungan kausalitas antara religiusitas

dan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara dua arah, dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi religiusitas dan sebaliknya religiusitas juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Barro & McCleary, 2006; Wang & Lin 2014).

F. Keterkaitan Religiusitas dan Ketimpangan Pendapatan

Religiusitas juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Secara umum ajaran agama mengisyaratkan pentingnya azas keadilan dalam kegiatan ekonomi. Apalagi ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun hasil kajian empiris mengenai hubungan antar kedua variabel tersebut masih memberikan kesimpulan yang paradoks. hubungan antara religiusitas dan ketimpangan pendapatan masih sulit untuk dipahami dan masih membingungkan (Keister & Eagle, 2016). Sebelumnya Elgin et al., (2013) menemukan bahwa tingkat religiusitas berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Daerah dengan tingkat religiusitas tinggi dicirikan dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Selanjutnya penelitian Matteo (2015) menyajikan bukti empiris bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut sangat lemah.

G. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan mengacu pada ketimpangan distribusi pendapatan yakni terjadinya kesenjangan (*gap*) antara kaya dan miskin di sebuah negara (Shin, 2012). Peningkatan ketimpangan yang tinggi mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat semakin buruk. Hal ini disebabkan terjadinya kesenjangan (*gap*) yang semakin lebar dalam penerimaan pendapatan di masyarakat. Di satu sisi terdapat sekelompok masyarakat memiliki pendapatan relatif besar, dan di sisi lain sekelompok masyarakat memiliki pendapatan relatif kecil. Penurunan ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan semakin baik, ditandai dengan semakin kecilnya kesenjangan antara

kaya dan miskin. Idealnya, pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berjalan seiring dengan upaya perbaikan distribusi pendapatan (Goni et al., 2011; Gallo & Sagales, 2013). Sehingga hasil pembangunan ekonomi dalam bentuk perbaikan tingkat kesejahteraan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, kenyataannya, peningkatan pendapatan masyarakat tidak selalu disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (Doerrenberg, & Peichl, 2014). Hal ini telah dibuktikan oleh sejumlah peneliti dalam banyak kasus perekonomian (Gupta et al., 2005; Afonso et al., 2008). Karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi perlu dibarengi dengan intervensi kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki distribusi pendapatan.

Hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sudah lama menjadi subjek penelitian ekonomi. Bahkan hingga saat ini, terdapat banyak kajian dalam teori ekonomi yang memberikan perhatian pada hubungan antara kedua variabel tersebut. Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Lewis dan Kaldor berargumen bahwa ketimpangan yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan (Woo, 2011). Berbeda dengan Lewis dan Kaldor, penelitian Kuznets (1955) menemukan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menghasilkan hipotesis kurva U terbalik, yang kemudian dikenal dengan *Inverted U-curve Hypothesis*. Menurut hipotesis ini, tahap awal pembangunan ekonomi di suatu negara, berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan di negara tersebut. Kemudian pada tahap menengah, ketimpangan pendapatan semakin kecil dan kemudian mengalami penurunan ketika negara tersebut sejahtera.

Dalam tataran empiris, belum terdapat satu konsensus mengenai bentuk hubungan tersebut. Dengan kata lain, bentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan masih menjadi kontroversi, seperti dikemukakan oleh Muinelo-Gallo and Roca-Sagales (2011) bahwa bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut masih menjadi pertanyaan terbuka. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hubungan negatif antara pertumbuhan dan ketimpangan. Namun penelitian terbaru cenderung mendukung hubungan positif antara kedua variabel tersebut (Garcia- Penalosa & Turnovsky, 2007).

Adanya hubungan yang paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan juga ditemukan oleh Shin (2012) bahwa di negara Asia Timur dan Amerika Selatan menunjukkan hubungan negatif antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Namun di negara maju seperti Amerika dan Perancis hubungan antara kedua variabel tersebut adalah positif. Penelitian Sameti & Rafie (2010) juga memberikan bukti empiris bahwa ketimpangan pendapatan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya Sabir et al. (2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan temuan tersebut, Amri (2017) menemukan adanya hubungan yang sangat lemah antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Namun demikian hasil *granger causality test* menemukan adanya *unidirectional causality* dari ketimpangan pendapatan ke pertumbuhan ekonomi. Terakhir, hasil kajian Amri & Nazamuddin (2018) menemukan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya dalam jangka pendek, hubungan antara kedua variabel tersebut positif dan signifikan.

Mengacu pada uraian di atas dapat dipahami bahwa temuan penelitian empiris yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti belum memberikan kesimpulan yang sama mengenai arah dan signifikansi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Di satu sisi terdapat temuan penelitian yang mendasari argumen bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut adalah searah, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Di sisi lain juga terdapat hasil penelitian empiris yang menyimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut adalah negatif.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Batasan Penelitian

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dibatasi hanya pada religiusitas pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Religiusitas yang dimaksudkan adalah religiusitas ke-islaman (*Islamic religiosity*). Tingkat religiusitas suatu daerah dapat di-*proxi* dari jumlah institusi keagamaan di daerah tersebut (Wang & Lin, 2014). Daerah dengan jumlah institusi keagamaan relatif lebih banyak mengindikasikan bahwa intensitas kegiatan keagamaan di daerah tersebut juga lebih tinggi, dan hal ini dapat merefleksikan tingkat religiusitas itu sendiri. Sehingga dalam kajian ini tingkat religiusitas suatu daerah didasarkan pada jumlah mesjid, pesantren dan dayah dan jumlah santri. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi didasarkan pada PDRB per kapita yang diterima masyarakat. Terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan diukur dengan menggunakan gini ratio.

B. Metode dan Desain Penelitian

Penelitian menggunakan metode campuran (*mix methods*) yakni kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan desain kausalitas yakni menganalisis hubungan sebab akibat antara intensitas religiusitas keislaman dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya metode kualitatif dimaksudkan untuk menggali informasi secara lebih detail tentang gambaran religiusitas suatu wilayah berdasarkan indikator pengukuran yang telah disusun oleh peneliti.

C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari

sejumlah informan yang dianggap dapat memberikan data kualitatif yang diperlukan dalam penelitian. Mereka terdiri dari tokoh agama, pemilik/pengelola pasantren dan tokoh masyarakat di kabupaten kota yang dipilih berdasarkan tingkat religiusitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara atau tanya jawab langsung terkait dengan sikap dan perilaku serta antusiasme masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan yang kemudian juga dikaitkan dengan sikap dan perilaku mereka dalam kegiatan ekonomi. Selain menggunakan data primer, penelitian juga menggunakan data sekunder berbentuk *panel data* terdiri dari data *time series* (runut waktu) selama periode tahun 2010-2017 ($n = 8$) dan data kerat silang (*cross section data*) yang diambil dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi terhadap laporan/publikasi instansi terkait.

D. Operasional Variabel

Variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri dari religiusitas ke-Islaman, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Definisi dan pengukuran masing-masing indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat religiusitas merupakan kecenderungan masyarakat suatu daerah dalam menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran Islam. Tingkat religiusitas suatu daerah diproxi dengan pendekatan kuantitatif terdiri dari:
 - a. Jumlah tempat ibadah yang dalam hal ini masjid dan mushallah dihitung dengan satuan unit per 10.000 jiwa penduduk.
 - b. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan bersifat non formal seperti pasantren, langgar, dan balai pengajian dihitung dengan satuan unit per 20.000 jiwa penduduk.

- c. Jumlah santri yang belajar pada Lembaga pendidikan non formal, dihitung dengan banyaknya jumlah santri per 10.000 jiwa penduduk.
2. Pertumbuhan ekonomi *diproxi* dengan PDRB per kapita tanpa migas, yaitu nilai barang dan jasa per kapita yang diproduksi oleh masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam periode tahun tertentu berdasarkan harga konstan tahun 2010 dengan satuan juta rupiah.
3. Ketimpangan pendapatan, adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu daerah. Pengukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Gini rasio (GR).

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif fokus pada penggunaan data sekunder yang sifatnya kuantitatif seperti religiusitas (yang *diproxi* dari tiga dimensi terdiri dari jumlah mesjid, pesantren dan santri), pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Model analisis data yang digunakan adalah panel *vector autoregressive* (PVAR). Penggunaan PVAR sebagai alat analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah menguji stasioneritas data, dalam hal ini digunakan Levin, Lin & Chu (LLC) method (Levine *et al.* 2002); I'm & Shin (IPS) method (Im *et al.* 2003); ADF-Fisher Chi-square (Choi, 2001); dan PP-Fisher Chi-square (Phillips & Sul, 2003) untuk menentukan tingkat integrasi data. Jika data dinyatakan stasioner pada level pertama, maka model analisis dilanjutkan dengan penggunaan *panel vector autoregressive* (PVAR). Selanjutnya, jika data mencapai stasioner pada *first difference*, maka perlu dilakukan uji kointegrasi. Uji ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat religiusitas (Engle & Granger, 1987). Jika data tidak terkointegrasi

atau tidak terdapat hubungan jangka panjang, maka tahap ketiga melakukan analisis dilanjutkan dengan *panel vector autorregressive* (PVAR) pada *first difference*. Sebaliknya, jika data dinyatakan memiliki hubungan jangka panjang, maka model analisis yang digunakan adalah *panel vector error correction model* (PVECM) (Maddala & Wu, 1999; Libanio, 2005; Murthy & Okunade, 2018).

Hasil uji akar unit mengindikasikan bahwa kondisi stasioner dicapai pada *first difference* (Tabel 2). Selanjutnya hasil uji kointegrasi mengindikasikan bahwa variabel dalam penelitian tidak memiliki hubungan jangka panjang atau tidak terkointegrasi (Tabel 3). Karena itu model analisis yang digunakan untuk menguji keterkaitan antara religiusitas keislaman dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah PVAR. Guna mendapatkan hasil terbaik, seluruh variabel ditransformasi dalam bentuk logaritma natural sehingga model empiris PVAR yang menjelaskan hubungan antar variabel seperti ditunjukkan dalam persamaan berikut.

$$\Delta LGR_{it} = \alpha_0 + \sum_{j=1}^n \beta_{1j} \Delta LGR_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{2j} \Delta LPDRB_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{3j} \Delta LMSJ_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{4j} \Delta LPSTR_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{5j} \Delta LSTR_{it-j} + \varepsilon_{it} \quad 3.1$$

$$\Delta LPDRB_{it} = \alpha_0 + \sum_{j=1}^n \beta_{1j} \Delta LGR_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{2j} \Delta LPDRB_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{3j} \Delta LMSJ_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{4j} \Delta LPSTR_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{5j} \Delta LSTR_{it-j} + \varepsilon_{it} \quad 3.2$$

$$\Delta LMSJ_{it} = \alpha_0 + \sum_{j=1}^n \beta_{1j} \Delta LGR_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{2j} \Delta LPDRB_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{3j} \Delta LMSJ_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{4j} \Delta LPSTR_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{5j} \Delta LSTR_{it-j} + \varepsilon_{it} \quad 3.3$$

$$\Delta LPSTR_{it} = \alpha_0 + \sum_{j=1}^n \beta_{1j} \Delta LGR_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{2j} \Delta LPDRB_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{3j} \Delta LMSJ_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{4j} \Delta LPSTR_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{5j} \Delta LSTR_{it-j} + \varepsilon_{it} \quad 3.4$$

$$\Delta LSTR_{it} = \alpha_0 + \sum_{j=1}^n \beta_{1j} \Delta LGR_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{2j} \Delta LPDRB_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{3j} \Delta LMSJ_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{4j} \Delta LPSTR_{it-j} + \sum_{j=1}^n \beta_{5j} \Delta LSTR_{it-j} + \varepsilon_{it} \quad 3.5$$

Dimana, ΔLGR adalah *first difference* logaritma natural Gini rasio sebagai ukuran ketimpangan pendapatan, $\Delta LPDRB$ adalah *first difference* logaritma natural PDRB per kapita sebagai ukuran pertumbuhan

ekonomi, $\Delta LMSJ$ adalah *first difference* logaritma natural jumlah mesjid per 10.000 jiwa penduduk, $\Delta LPSTR$ adalah *first difference* logaritma natural jumlah pesantren per 20.000 jiwa penduduk, dan $\Delta LSTR$ adalah *first difference* logaritma natural jumlah santri per 10.000 jiwa penduduk. Selanjutnya i adalah kabupaten kota dan t adalah periode tahun analisis. Kemudian α dan β adalah konstanta yang diperoleh melalui hasil estimasi, serta μ menggambarkan *stochastic error term* persamaan PVAR.

Guna menguji hubungan kausal antar variabel digunakan *Granger causality test*. Hasil uji ini dapat mengidentifikasi arah kausalitas antar variabel sehingga dapat diketahui apakah dimensi religiusitas keislaman yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan atau sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang menyebabkan perubahan pada dimensi religiusitas.

Selanjutnya pendekatan kualitatif diawali dengan menganalisis data kualitatif sehubungan dengan tingkat religiusitas. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan tanya jawab langsung dengan beberapa orang tokoh agama dan tokoh masyarakat di beberapa daerah kabupaten kota di Aceh. Dalam hal ini, analisis kualitatif juga dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap religiusitas ke-Islaman (*Islamic religiosity*) dan praktiknya dalam kehidupan nyata masyarakat terutama dalam kegiatan ekonomi.

BAB IV

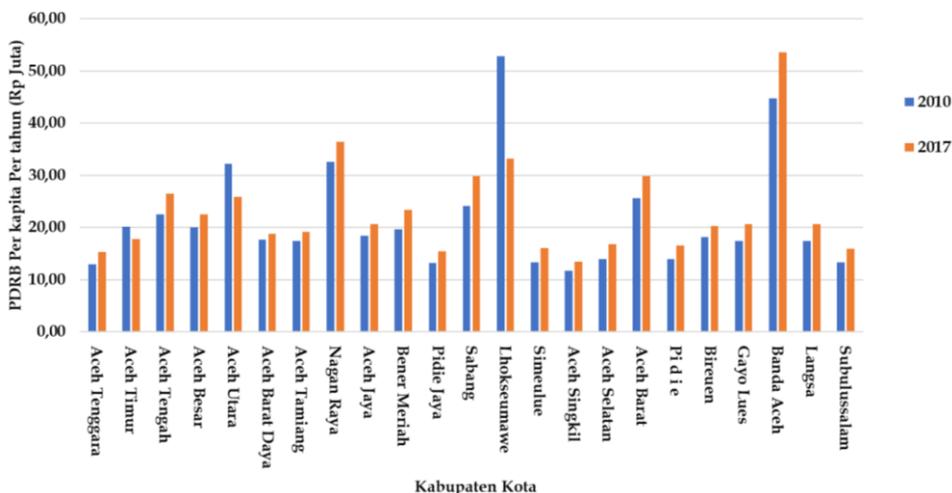
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran pertumbuhan ekonomi didasarkan pada produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2010. Daerah dengan PDRB per kapita lebih tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain dengan PDRB per kapita lebih rendah.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa PDRB per kapita kabupaten kota di Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah juga meningkat. Hingga tahun 2017, daerah dengan PDRB per kapita paling tinggi adalah kota Banda Aceh yakni sebesar Rp53,63 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp44,70 juta. Kemudian menyusul kabupaten Nagan Raya di urutan kedua dengan PDRB per kapita pada tahun yang sama sebesar Rp36,37 juta. Angka ini juga jauh lebih besar di bandingkan dengan periode 2010 sebesar Rp32,60 juta. Dalam periode tahun yang sama, daerah dengan PDRB per kapita paling rendah adalah Aceh Singkil sebesar Rp13,41 juta, kemudian menyusul Aceh Tenggara sebesar Rp15,34 juta. Kendatipun pada tahun 2017 masyarakat yang tinggal di dua daerah tersebut memiliki pendapatan relatif kecil dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah lainnya di Aceh, namun kesejahteraan mereka tetap lebih baik bila dibandingkan dengan periode tahun 2010. Hal ini ditunjukkan oleh PDRB per kapita di dua daerah tersebut masing-masing sebesar Rp11,73 juta untuk Aceh Singkil dan sebesar Rp12,99 juta untuk Aceh Tenggara, lebih kecil bila dibandingkan dengan PDRB per kapita pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan

PDRB per kapita sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Aceh periode 2010-2017 dapat dilihat Grafik 4.1.



Grafik 4.1

Perkembangan PDRP Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Kabupaten Kota di Aceh Selama periode tahun 2010-2017

Berdasarkan Grafik 4.1 di atas, dapat dipahami bahwa PDRB per kapita masing-masing kabupaten kota di Aceh mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali kota Lhokseumawe. Adanya penurunan PDRB per kapita di daerah tersebut disebabkan berkurangnya nilai produksi migas, yang kemudian berdampak negatif terhadap total PDRB daerah secara keseluruhan.

Secara rata-rata PDRB per kapita masyarakat seluruh kabupaten kota di Aceh pada tahun 2017 sebesar Rp22,98 juta lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2010 sebesar Rp21,44 juta. Terjadinya peningkatan pendapatan menginformasikan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten kota di Aceh juga mengalami perbaikan.

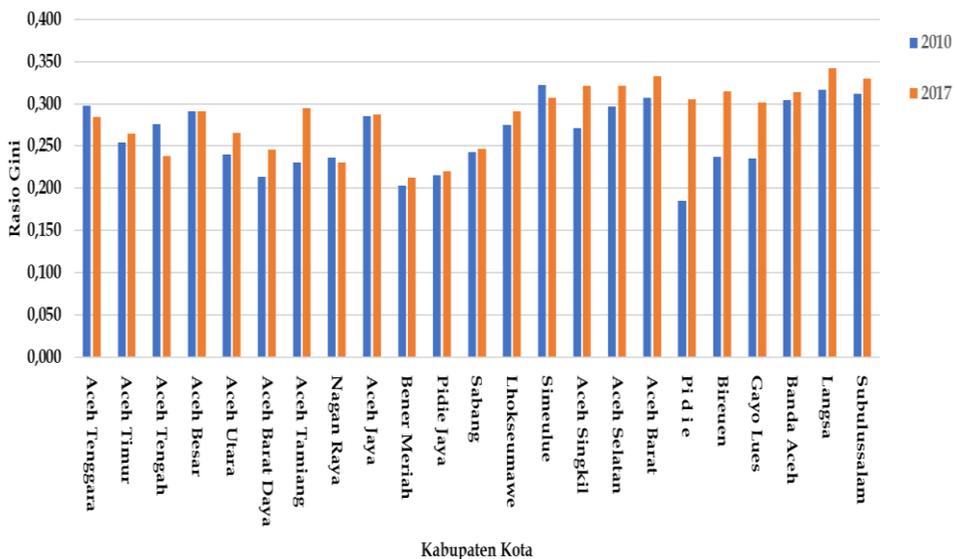
B. Deskripsi Perkembangan Ketimpangan Pendapatan

Kendatipun pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten kota di Aceh meningkat secara signifikan, namun di sebagian besar daerah kabupaten kota peningkatan juga diiringi dengan meningkatnya tingkat ketimpangan. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan masyarakat di sebagian besar daerah tidak diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan. Ketidakmerataan pendapatan semakin tinggi, dan kondisi tersebut mencerminkan semakin lebarnya kesenjangan (gap) antara kaya dan miskin di masyarakat. Indikasi tersebut ditunjukkan oleh peningkatan Gini rasio masing-masing daerah.

Daerah dengan peningkatan Gini rasio paling besar adalah kabupaten Pidie. Pada tahun 2017 Gini rasio daerah tersebut sebesar 0,305, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar 0,186. Kemudian menyusul Bireuen di urutan kedua. Pada tahun 2017 daerah tersebut memiliki Gini rasio sebesar 0,315 mengalami peningkatan secara signifikan dibanding tahun 2010 sebesar 0,237. Urutan ketiga ditempati oleh Aceh Tamiang. Pada periode 2017 Gini rasio daerah sebesar 0,295 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2010 sebesar 0,231.

Kendatipun secara umum Gini rasio kabupaten kota di Aceh mengalami peningkatan, namun terdapat sejumlah daerah dengan distribusi pendapatan semakin baik. Daerah tersebut adalah Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Simeulue. Pada tahun 2017, Gini rasio di empat daerah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan periode tahun 2010. Kabupaten Aceh Tenggara misalnya, pada tahun 2017 Gini rasio daerah tersebut sebesar 0,284, lebih kecil dibandingkan dengan rasio yang sama pada tahun 2010 sebesar 0,297. Gini rasio Aceh Tengah, Nagan Raya dan Simeulue pada tahun 2017 masing-masing sebesar 0,238; 0,231 dan 0,307. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rasio tahun 2010 masing-masing sebesar 0,276; 0,237 dan 0,322.

Terjadinya penurunan Gini rasio di tiga empat tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di daerah tersebut semakin baik seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan Gini rasio masing-masing kabupaten kota di Aceh selama periode tahun 2010-2017 dapat dilihat Grafik 4.2.



Grafik 4.2
Perkembangan Gini Rasio Menurut Kabupaten Kota di Aceh
Selama periode tahun 2010-2017

Berdasarkan Grafik 4.2 di atas dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan terjadi hampir seluruh daerah kabupaten kota di Aceh, kecuali Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Simeulue. Peningkatan ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah belum diiringi dengan perbaikan distribusi pendapatan di masyarakat. Kesenjangan (gap) antara kaya dan miskin di sebagian besar daerah di Aceh mengalami peningkatan. Padahal, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yang diindikasikan dengan meningkatnya

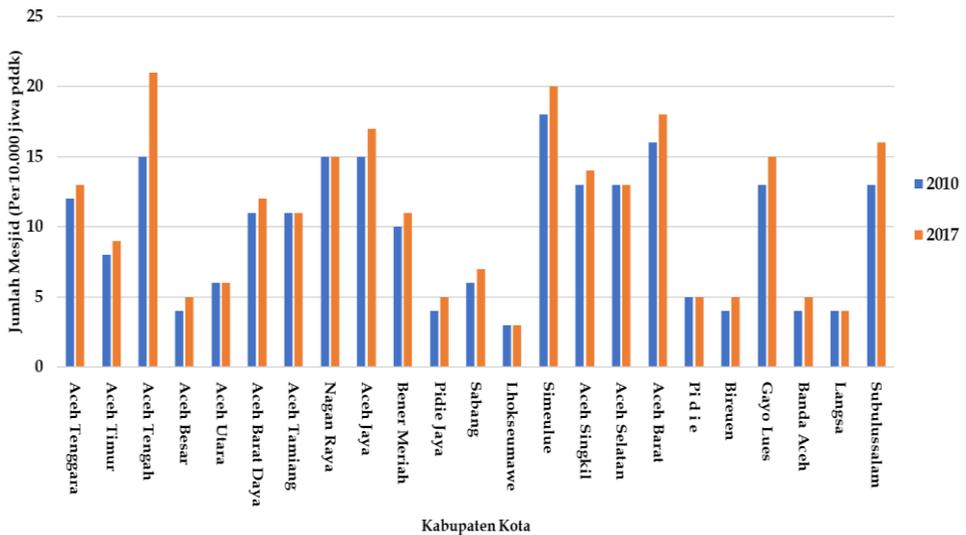
pendapatan per kapita idealnya disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan sehingga gap antara kaya dan miskin mengalami penurunan.

C. Deskripsi Perkembangan Religiusitas Keislaman

Pengukuran variabel religiusitas ke-islaman menggunakan tiga dimensi yakni keberadaan mesjid (rumah ibadah bagi umat Islam), jumlah pesantren dan jumlah santri. Daerah dengan jumlah mesjid dan pesantren relatif lebih banyak dianggap memiliki religiusitas ke-islaman yang lebih baik dibandingkan daerah dengan jumlah mesjid dan pesantren lebih sedikit. Demikian pula halnya dengan jumlah santri, peningkatan jumlah santri di suatu daerah dianggap tingkat religiusitas ke-islaman di daerah tersebut juga meningkat. Karena peningkatan santri jumlah santri di suatu daerah mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanaman nilai-nilai religiusitas ke-islaman bagi anak-anak mereka.

Menggunakan dimensi mesjid diperoleh indikasi bahwa tingkat religiusitas keislaman masyarakat kabupaten kota di Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah mesjid di masing-masing daerah. Menggunakan ukuran jumlah mesjid per 10.000 jiwa penduduk, daerah dengan peningkatan jumlah mesjid relatif lebih tinggi adalah Aceh Tengah. Pada tahun 2017, jumlah mesjid di daerah tersebut 21 unit per 10.000 jiwa penduduk, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode tahun 2010 sebanyak 15 unit. Di urutan kedua terdapat kota Subulussalam dengan mesjid sebanyak 16 unit pada tahun 2017, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebanyak 13 unit. Signifikansi peningkatan jumlah mesjid di dua daerah tersebut tentunya dapat dijadikan indikasi bahwa kesadaran masyarakat Aceh Tengah dan kota Subulussalam tentang pentingnya rumah ibadah juga meningkat secara signifikan. Selanjutnya di urutan ketiga terdapat kabupaten Aceh

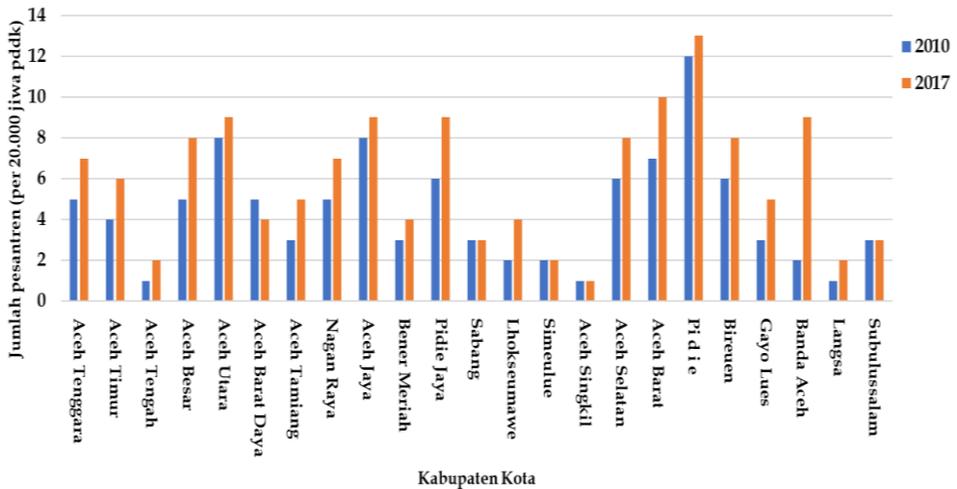
Jaya, Simeulue dan Aceh Barat. Peningkatan jumlah mesjid di tiga daerah tersebut selama periode 2010-2017 masing-masing sebanyak 2 unit. Grafik 4.3 mendeskripsikan perkembangan jumlah mesjid pada kabupaten kota di Aceh selama periode 2010-2017.



Grafik 4.3
Perkembangan Jumlah Mesjid Menurut Kabupaten Kota di Aceh
Selama periode tahun 2010-2017

Berdasarkan Grafik 4.3 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah mesjid terjadi di sebagian besar daerah di Aceh. Namun demikian, terdapat sejumlah daerah dengan rasio jumlah mesjid terhadap jumlah penduduk relatif tetap yakni, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Selatan, Pidie, kota Lhokseumawe dan Langsa. Menggunakan ukuran jumlah mesjid per 10.000 jiwa penduduk, hasil perhitungan statistik menunjukkan tidak adanya perubahan jumlah mesjid di daerah tersebut. Kalau pun ada, pertumbuhan jumlah penduduk bergerak proporsional dengan peningkatan jumlah mesjid sehingga rasio-nya tetap sama.

Berdasarkan dimensi jumlah pesantren, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat religiusitas keislaman masing-masing daerah di Aceh juga mengalami peningkatan. Menggunakan rasio jumlah pesantren per 20.000 jiwa penduduk, diketahui bahwa selama periode tahun 2010-2017 jumlah lembaga pendidikan islam non formal tersebut meningkat secara signifikan. Daerah dengan peningkatan jumlah pesantren paling besar adalah kota Banda Aceh. Pada tahun 2017 jumlah pesantren di daerah tersebut sebanyak 9 unit per 20.000 jiwa penduduk, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2010 sebanyak 2 unit. Dengan kata lain, dalam periode 2010-2017 peningkatan jumlah pesantren di kota Banda Aceh sebanyak 7 unit per 10.000 jiwa penduduk. Di urutan kedua adalah kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar dan Pidie Jaya dengan peningkatan jumlah pesantren dalam periode tahun yang sama masing-masing sebanyak 3 unit per 10.000 jiwa penduduk. Terjadinya peningkatan jumlah lembaga pendidikan islam di empat daerah tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan ke-islaman juga meningkat. Apalagi di kota Banda Aceh, sebagian lembaga pendidikan Islam tersebut termasuk pesantren modern yang dalam kurikulumnya juga memasukkan pelajaran umum bagi santrinya. Sehingga santri tidak hanya memperoleh materi pelajaran agama islam sebagaimana yang terjadi pada pesantren tradisional, tetapi juga dapat menerima pelajaran umum seperti yang diajarkan pada sekolah-sekolah umum. Kondisi ini menjadikan pesantren modern sebagai alternatif pilihan terbaik bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan bagi anak mereka. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran perkembangan jumlah pesantren pada 23 kabupaten kota di Aceh selama periode tahun 2010-2017 dapat dilihat Grafik 4.4.



Grafik 4.4

Perkembangan Jumlah Pesantren Menurut Kabupaten Kota di Aceh Selama periode tahun 2010-2017

Berdasarkan Grafik 4.4 di atas dapat dilihat bahwa kendatipun peningkatan jumlah pesantren sebagai lembaga pendidikan islam meningkat di sebagian besar kabupaten kota di Aceh, namun terdapat sejumlah daerah dengan jumlah pesantren tidak mengalami perubahan seperti kota Subulussalam, Aceh Singkil, Simeulue, dan Sabang. Tidak adanya perubahan rasio pesantren terhadap jumlah penduduk di empat daerah tersebut bukanlah berarti tidak terjadinya perbaikan religiusitas dari dimensi pesantren, tetapi peningkatan jumlah pesantren proporsional dengan pertumbuhan jumlah penduduk selama periode tahun 2010-2017. Sehingga jumlah pesantren per 20.000 jiwa penduduk tetap sama (tidak mengalami perubahan).

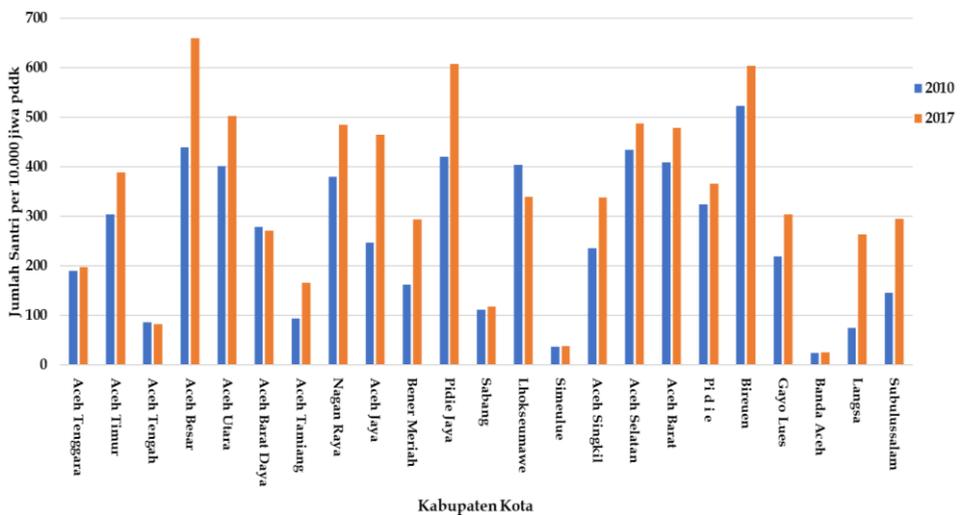
Grafik 4.4 di atas juga menginformasikan adanya daerah dengan rasio pesantren terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, yakni kabupaten Aceh Barat Daya. Pada tahun 2017 jumlah pesantren di daerah tersebut sebanyak 4 unit per 20.000 jiwa penduduk, lebih kecil dibandingkan periode tahun 2010 sebanyak 5 unit. Penurunan ini tidak serta merta dapat diartikan bahwa religiusitas berdasarkan dimensi

pesantren mengalami penurunan, akan tetapi perkembangan jumlah penduduk selama periode 2010-2017 tidak proporsional dengan perkembangan jumlah lembaga pendidikan pesantren. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan rasio jumlah pesantren terhadap jumlah penduduk.

Dimensi ketiga dalam pengukuran religiusitas ke-islaman adalah jumlah santri. Penggunaan jumlah santri dalam mengukur suatu daerah didasarkan pada pemikiran bahwa keberadaan santri dapat dijadikan refleksi dari minat masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan pesantren sebagai salah satu alternatif pilihan untuk mendalami ajaran islam. Peningkatan jumlah santri di suatu daerah secara implisit dapat diartikan terjadinya peningkatan keinginan masyarakat untuk mendalami ajaran Islam, dan keinginan tersebut merupakan refleksi dari religiusitas ke-islaman itu sendiri. Sebab, seseorang yang memiliki religiusitas relatif tinggi memiliki keinginan untuk lebih besar dalam mendalami ajaran agamanya dibandingkan dengan orang lain dengan religiusitas relatif rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum jumlah santri di masing-masing kabupaten kota di Aceh cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa berdasarkan dimensi santri, tingkat religiusitas keislaman masyarakat di Aceh juga meningkat. Dalam hal ini, santri yang dimaksudkan diukur dengan jumlah santri per 10.000 jiwa penduduk. Hingga tahun 2017, daerah dengan jumlah santri terbanyak adalah kabupaten Aceh Besar yakni sebanyak 659 orang santri per 10.000 jiwa penduduk. Angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebanyak 439 orang. Di urutan berikutnya terdapat kabupaten Pidie Jaya dengan jumlah santri pada tahun 2017 sebanyak 607 orang per 10.000 jiwa penduduk, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode 2010 sebanyak 420 santri per 10.000 jiwa penduduk. Angka statistik ini

mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk mempelajari nilai-nilai ke islamian di dua daerah tersebut mengalami perbaikan yang signifikan. Kesadaran tersebut direfleksikan melalui keputusan orang tua untuk memasukan anak mereka ke pesantren sebagai lembaga pendidikan islam. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran jumlah santri berdasarkan kabupaten kota di Aceh selama periode 2010-2017 dapat dilihat Grafik 4.5.



Grafik 4.5
Perkembangan Jumlah Santri Menurut Kabupaten Kota di Aceh
Selama periode tahun 2010-2017

Berdasarkan Grafik 4.5 di atas dapat dipahami bahwa meskipun secara umum terjadi peningkatan jumlah santri secara signifikan di Aceh, namun terdapat sejumlah kabupaten kota dengan jumlah santri relatif stabil dan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Seperti halnya kota Banda Aceh dan Simeulue, pada tahun 2017 jumlah santri di daerah tersebut masing-masing sebanyak 25 orang dan 38 orang per 10.000 jiwa penduduk, hanya mengalami peningkatan sebanyak 1 orang dibandingkan dengan periode tahun 2010, dimana jumlah santri di dua daerah tersebut masing-masing sebanyak 24 orang dan 37 orang per 10.000 jiwa penduduk. Selain itu, terdapat dua daerah dengan jumlah

santri mengalami penurunan yakni kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Barat Daya. Pada tahun 2017 jumlah santri di dua daerah tersebut masing-masing sebanyak 82 orang dan 278 orang per 10.000 jiwa penduduk, mengalami penurunan masing-masing sebanyak 8 orang dan 4 orang dibandingkan dengan periode tahun 2010.

D. Hasil Statistik Deskriptif

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten kota di Aceh relatif berbeda. Perbedaan pertumbuhan ekonomi terlihat dari adanya perbedaan PDRB per kapita antar kabupaten kota. Di satu sisi terdapat daerah dengan PDRB per kapita relatif lebih tinggi dan disisi lain juga ada daerah dengan PDRB per kapita relatif lebih rendah. Daerah dengan PDRB per kapita relatif tinggi di antaranya kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Sabang. Sebaliknya daerah dengan pendapatan relatif rendah di antara kabupaten Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Selatan dan kota Subulussalam.

Distribusi pendapatan masyarakat di masing-masing kabupaten kota juga relatif berbeda. Di satu sisi terdapat daerah dengan ketimpangan pendapatan relatif tinggi dan di sisi lain ada daerah dengan ketimpangan pendapatan relatif rendah. Daerah dengan ketimpangan pendapatan relatif tinggi di antaranya kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie, Bireuen, Gayo Lues, Banda Aceh, Langsa dan Subulussalam. Hingga tahun 2017 Gini rasio di daerah tersebut lebih besar dari 0,30. Sebaliknya, daerah kabupaten kota lainnya mengalami ketimpangan relatif rendah dengan Gini rasio pada periode tahun yang sama lebih kecil dari 0,30.

Berkaitan dengan religiusitas ke-islaman yang pengukurannya menggunakan tiga dimensi seperti dijelaskan sebelumnya, hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwa religiusitas ke-islaman

masyarakat di masing-masing kabupaten kota di Aceh juga relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil statistik deskriptif variabel penelitian ditunjukkan dalam Tabel 1.

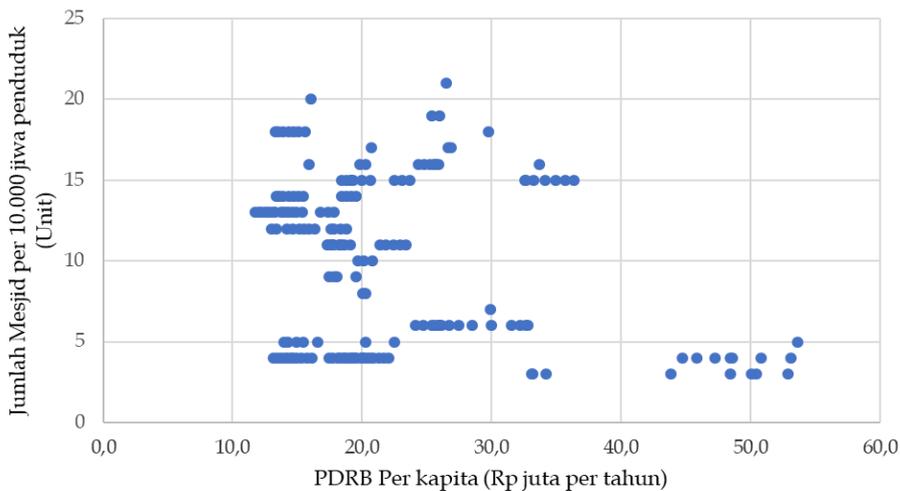
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Parameter Statistik	PDRB per kapita (Rp juta)	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Jumlah Mesjid per 10.000 pddk	Jumlah Pesantren per 20.000 pddk	Jumlah santri per 10.000 pddk
Mean	22,117	0,279	10	5	298
Median	19,163	0,281	11	5	286
Maximum	53,635	0,454	21	13	849
Minimum	11,733	0,186	3	1	17
Observations	184	184	184	184	184

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan Eviews 10.

Tabel 1 di atas memperlihatkan statistik deskriptif masing-masing variabel. Secara rata-rata PDRB per kapita masing-masing kabupaten kota di Aceh selama periode 2010-2017 sebesar Rp22,117 juta, dengan rata-rata Gini rasio sebesar 0,279. Berkaitan dengan religiusitas ke-islaman, rata-rata jumlah mesjid per 10.000 penduduk sebanyak 10 unit dengan rata-rata santri 298 orang. Selanjutnya rata-rata jumlah pesantren per 20.000 penduduk sebanyak 5 unit.

Deskripsi mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan dimensi-dimensi religiusitas keislaman juga dapat digambarkan melalui *scatter diagram* (diagram pencar). Diagram ini pada dasarnya tidak hanya dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan suatu variabel, tetapi secara grafis juga dapat menginformasikan pola dan arah hubungan antar variabel. Pola dan arah hubungan tersebut ditunjukkan oleh arah pergerakan titik-titik dalam diagram pencar. *Scatter diagram* antara mesjid dengan pertumbuhan ekonomi seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.1.

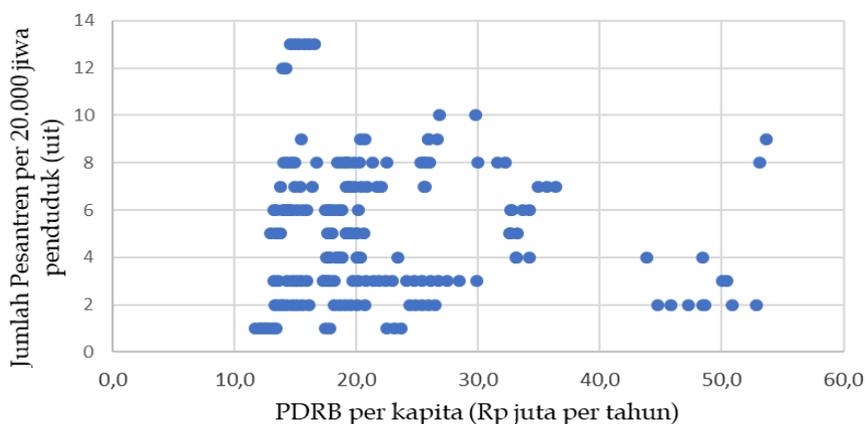


Gambar 4.1
Scatter Diagram antara Mesjid dan PDRB per kapita

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas dapat dilihat sebaran titik-titik yang menggambarkan kombinasi antara jumlah mesjid dengan PDRB per kapita. Umumnya daerah dengan PDRB per kapita di atas Rp40.00 juta per tahun memiliki mesjid relatif sedikit, yakni kurang dari 5 unit mesjid per 10.000 jiwa penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan sebaran titik titik sebelah kanan (garis horizontal) dengan posisi dibawah 5 (garis vertikal). Daerah dengan jumlah mesjid relatif banyak umumnya kabupaten kota yang masyarakatnya memiliki PDRB per kapita berkisar antara Rp10-40 juta per tahun. Bahkan ada daerah dengan jumlah mesjid lebih dari 20 unit per 10.000 jiwa penduduk. Indikasi ini ditunjukkan oleh titik tertinggi dalam *scatter diagram* di atas dan terdapat di daerah dengan PDRB per kapita berkisar antara Rp20-30 juta per tahun. Namun demikian juga terdapat sejumlah daerah dengan PDRB per kapita berkisar antara Rp10-20 juta per tahun yang memiliki mesjid di bawah 5 unit per 10.000 jiwa penduduk, meskipun jumlah hanya sebagian kecil dari kabupaten kota di Aceh.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara jumlah mesjid dan pertumbuhan ekonomi tidak begitu jelas, dan tidak menunjukkan arah hubungan yang akurat untuk diinterpretasikan. Jumlah mesjid yang relatif sedikit tidak hanya terdapat di daerah dengan pendapatan masyarakatnya relatif rendah, tetapi juga wujud pada daerah yang masyarakatnya berpendapatan tinggi. Demikian pula halnya dengan jumlah mesjid yang relatif lebih banyak, tidak hanya terjadi di daerah dengan pendapatan rendah, tetapi juga wujud di daerah dengan pendapatan relatif tinggi. Karena itu, dalam jangka panjang belum cukup bukti untuk menyimpulkan arah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan dimensi religiusitas tersebut.

Hubungan antara pesantren dan pertumbuhan ekonomi juga tidak menunjukkan pola yang jelas. Pesantren dengan jumlah relatif sedikit juga terdapat di kabupaten kota dengan PDRB per kapita relatif tinggi dan relatif rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 4.2.

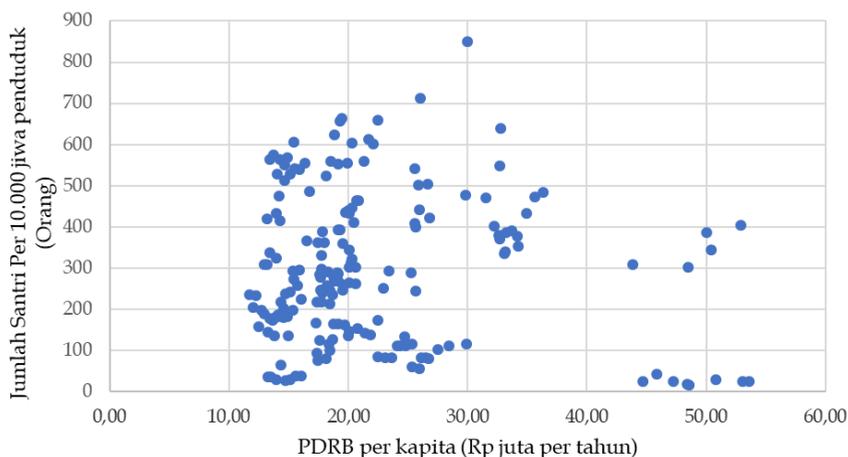


Gambar 4.2
Scatter Diagram antara Pesantren dan PDRB per kapita

Gambar 4.2 memperlihatkan sebaran titik-titik lebih menumpuk pada daerah dengan PDRB per kapita berkisar antara Rp10-30 juta per tahun. Namun demikian, dengan menjadikan garis horizontal sebagai

representasi jumlah pesantren per 20.000 jiwa penduduk dapat diartikan bahwa daerah dengan PDRB per kapita sejumlah tersebut memiliki jumlah pesantren yang berbeda. Di satu sisi terdapat daerah dengan pesantren relatif sedikit di bawah 4 unit, ditunjukkan oleh titik-titik dibawah 4, dan disisi lain juga terdapat daerah dengan pesantren relatif banyak di atas 8 unit, ditunjukkan oleh titik-titik di atas 8 pada garis horizontal. Sebaran titik-titik pada *scatter diagram* di atas juga belum cukup kuat untuk menyimpulkan arah hubungan antara pesantren dan pertumbuhan ekonomi.

Sama halnya dengan keterkaitan antara pesantren dan pertumbuhan ekonomi, pola hubungan antara santri dan pertumbuhan ekonomi juga belum memperlihatkan arah yang jelas. Namun demikian dapat diketahui bahwa keberadaan santri sebagai salah satu dimensi religiusitas keislaman lebih banyak pada daerah dengan PDRB per kapita berkisar antara Rp10-30 juta per tahun. Di daerah ini jumlah santri juga bervariasi, namun sebagian besar memiliki santri berkisar antara 100-400 orang per 10.000 jiwa penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 4.3.

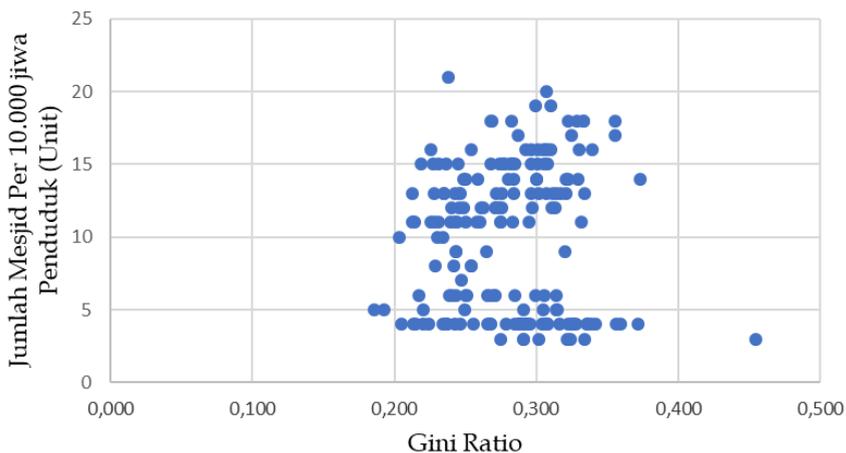


Gambar 4.3
Scatter Diagram antara Santri dan PDRB per kapita

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas dapat dideskripsikan bahwa daerah dengan PDRB per kapita relatif lebih besar di atas Rp40,- juta per tahun, memiliki jumlah santri relatif sedikit. Bahkan terdapat daerah dengan santri di bawah 100 orang per 10.000 jiwa penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan titik-titik yang tersebar pada bagian kanan *scatter diagram* (garis horizontal) dan terletak di bawah 100 (garis vertikal). Jumlah santri terbanyak di atas 800 orang per 10.000 jiwa penduduk terdapat pada daerah dengan PDRB per kapita Rp30,- juta per tahun. Bukti empiris ini ditunjukkan oleh titik paling tinggi dalam gambar scatter diagram di atas.

Arah hubungan antara dimensi religiusitas dengan ketimpangan pendapatan juga tidak menunjukkan arah yang jelas. Dengan kata lain, tidak ada pola tertentu mengenai apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif. Hubungan antara mesjid dan ketimpangan misalnya, sebaran titik-titik scatter diagram menunjukkan terjadinya penumpukkan pada daerah dengan gini rasio berkisar antara 0,20-0,40 (Gambar 4.9). Kabupaten kota dengan gini rasio berada pada interval tersebut, tidak hanya terdapat jumlah mesjid di bawah 5 unit per 10.000 jiwa penduduk. Tetapi juga ada daerah dengan jumlah mesjid berkisar antara 15-20 unit per 10.000 jiwa penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa secara kuantitas keberadaan rumah ibadah tersebut tidak secara nyata berhubungan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Di satu sisi terdapat daerah dengan ketimpangan tinggi memiliki jumlah mesjid relatif banyak, dan di sisi lain juga ada daerah dengan ketimpangan tinggi dengan jumlah mesjid relatif sedikit. Demikian pula halnya di kabupaten kota dengan ketimpangan pendapatan relatif rendah. Di satu sisi juga ada daerah dengan mesjid relatif banyak, namun di sisi lain tidak sedikit pula daerah dengan ketimpangan rendah yang memiliki mesjid relatif sedikit. Hal inilah yang memberikan kesimpulan tidak adanya arah hubungan yang jelas antara ketimpangan pendapatan yang

direfleksikan dengan gini rasio, dengan jumlah mesjid sebagai salah satu dimensi religiusitas keislaman.

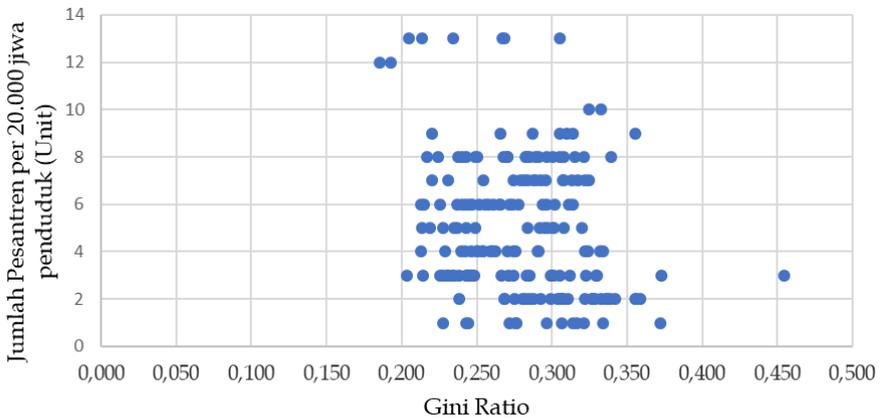


Gambar 4.4
Scatter Diagram antara Mesjid dan Gini rasio

Gambar 4.4 juga memperlihatkan adanya daerah dengan ketimpangan tinggi dengan jumlah mesjid kurang dari 5 unit per 10.000 jiwa penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan titik paling kanan (pada garis horizontal). Namun demikian juga terdapat daerah dengan ketimpangan rendah dengan jumlah mesjid juga kurang dari 5 unit per 10.000 jiwa penduduk. Hal ini mengindikasikan secara kuantitas, keberadaan mesjid di Aceh belum berjalan searah dengan perbaikan distribusi pendapatan di masyarakat. Dengan kata lain, daerah dengan distribusi pendapatan relatif baik (dengan gini rasio lebih rendah) belum tentu memiliki mesjid lebih banyak dibandingkan daerah dengan distribusi pendapatan relatif kurang baik. Demikian pula sebaliknya, daerah dengan ketimpangan tinggi belum tentu memiliki mesjid lebih sedikit dibandingkan daerah dengan ketimpangan rendah. Tidak adanya pola hubungan yang jelas antara ketimpangan pendapatan dengan mesjid sebagai salah satu dimensi religiusitas keislaman mengindikasikan bahwa gap atau kesenjangan antara kaya dan miskin di

suatu daerah tidak secara signifikan berdampak pada penurunan atau peningkatan jumlah rumah ibadah di daerah tersebut.

Dimensi religiusitas berikutnya adalah pesantren. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penggunaan pesantren sebagai salah satu dimensi religiusitas keislaman diukur dengan jumlah pesantren per 20.000 jiwa penduduk. Hasil pengolahan data juga memperlihatkan tidak pola hubungan yang jelas antara pesantren dengan ketimpangan pendapatan. Informasi ini secara grafis dapat dilihat dalam scatter diagram seperti dalam Gambar 4.5.

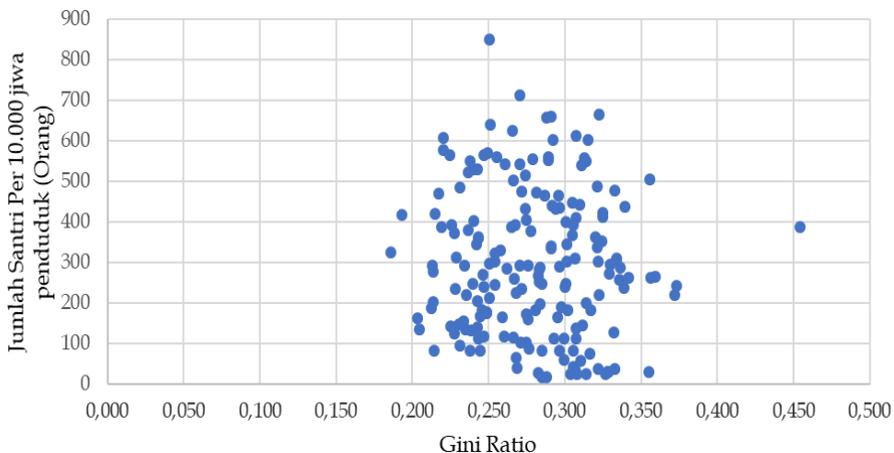


Gambar 4.5
Scatter Diagram antara Pesantren dan Gini rasio

Berdasarkan scatter diagram di atas dapat dilihat bahwa keberadaan pesantren sebagian besar tersebar di daerah dengan gini rasio berkisar antara 0,20-0,35. Jumlah pesantren pada kabupaten kota dengan gini rasio berada pada interval tersebut juga relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Di satu sisi terdapat daerah dengan jumlah pesantren relatif lebih besar di atas 8 unit per 20.000 jiwa penduduk, dan di sisi lain juga ada daerah dengan jumlah pesantren relatif sedikit di bawah 2 unit per 20.000 jiwa penduduk. Daerah dengan ketimpangan rendah atau tinggi belum tentu memiliki pesantren relatif

lebih banyak atau lebih kecil dibandingkan dengan daerah lainnya. Tidak adanya pola hubungan yang jelas antara pesantren dengan ketimpangan pendapatan juga diperkuat oleh sebaran titik titik *scatter diagram* pada daerah bagian kanan dan kiri dalam gambar di atas (dengan gini rasio di bawah 0,20 dan di atas 0,35). Titik titik ekstrim tersebut mengindikasikan bahwa terdapat daerah dengan gini rasio relatif tinggi namun memiliki jumlah pesantren relatif sedikit (dibawah 4 unit per 20.000 jiwa penduduk). Namun sebaliknya, terdapat sejumlah daerah dengan ketimpangan rendah memiliki jumlah pesantren 12 unit per 20.000 jiwa penduduk. Sehingga arah hubungan antara kedua variabel tersebut tidak dapat digambarkan dengan garis estimasi linier maupun non linier.

Arah dan pola hubungan antara religiusitas keislaman dimensi santri dengan ketimpangan pendapatan kabupaten kota di Aceh juga belum memberikan gambaran yang jelas. Hal ini ditunjukkan dengan titik-titik pada *scatter diagram* yang cenderung menumpuk pada daerah dengan gini rasio berkisar antara 0,20-0,35 seperti dalam Gambar 4.6.

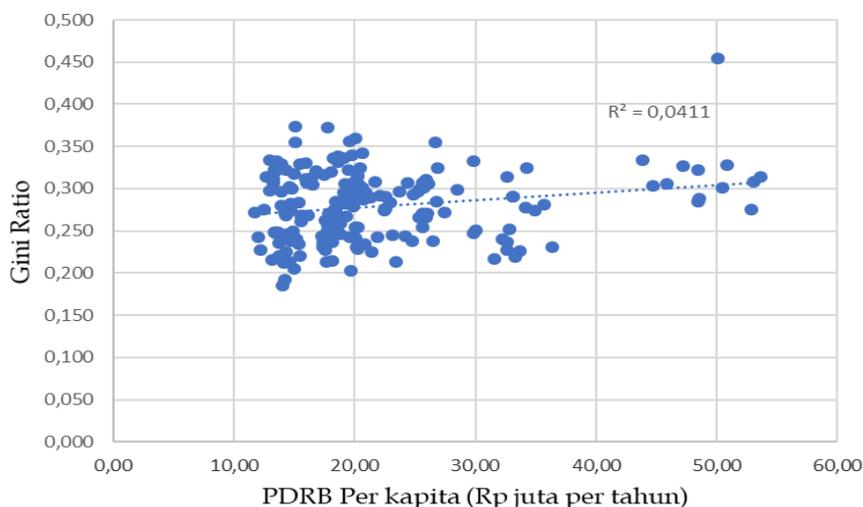


Gambar 4.6
Scatter Diagram antara Santri dan Gini rasio

Scatter diagram di atas menginformasikan bahwa keberadaan santri terkonsentrasi pada daerah dengan gini rasio berkisar antara 0,20-

0,35. Daerah dengan ketimpangan berada interval gini rasio tersebut, memiliki jumlah santri yang beragam. Di satu sisi terdapat daerah dengan jumlah santri relatif lebih sedikit di bawah 400 orang per 10.000 jiwa penduduk, dan di sisi lain juga terdapat daerah dengan jumlah santri relatif lebih banyak bahkan di atas 700 orang per 10.000 jiwa penduduk. Gambar 4.11 di atas juga dapat diartikan tidak ada arah hubungan yang jelas antara santri dengan gini rasio. Sehingga belum memberikan kesimpulan apakah hubungan antara dimensi religiusitas tersebut dengan ketimpangan pendapatan bersifat positif atau negatif.

Berbeda dengan hubungan antara dimensi-dimensi religiusitas keislaman dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan seperti ditunjukkan oleh sejumlah *scatter diagram* sebelumnya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menunjukkan pola yang jelas. Titik-titik pada *scatter diagram* meskipun menyebar, tetapi cenderung bergerak dari kiri bawah ke kanan atas seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.7.



Gambar 4.7
Scatter Diagram antara Gini rasio dan PDRB per kapita

Berdasarkan Gambar 4.7 di atas dapat diartikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah positif. Informasi statistik tersebut diperlihatkan oleh garis estimasi tentang hubungan kedua variabel tersebut bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kendatipun dengan kemiringan garis relatif datar, garis estimasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum daerah dengan PDRB per kapita relatif lebih besar memiliki gini rasio yang juga relatif besar. Sebaliknya, daerah dengan PDRB per kapita relatif kecil, memiliki gini rasio relatif kecil. Sehingga hubungan antara kedua variabel tersebut adalah positif. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan, selanjutnya ketika pertumbuhan ekonomi menurun, ketimpangan pendapatan juga menurun. Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian Garcia- Penalosa & Turnovsky (2007) di sejumlah negara maju dan hasil kajian Sameti dan Rafie (2010) juga memberikan bukti empiris bahwa ketimpangan pendapatan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, temuan penelitian bertolak belakang dengan temuan penelitian Shin (2012) di sejumlah negara Asia Timur dan Amerika Selatan dan hasil penelitian Sabir et al. (2015) di Sulawesi Utara yang membuktikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Kendatipun hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten kota di Aceh terbukti positif, namun hubungan tersebut sangat lemah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,04 (mendekat 0,00). Kendatipun berhubungan positif, dalam jangka panjang peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Temuan ini memperkuat hasil kajian Amri (2017) menggunakan data panel 8 provinsi di Sumatera yang juga membuktikan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut sangat lemah.

E. Hasil Uji Akar Unit

Salah satu syarat penggunaan model dinamis VAR sebagai alat analisis data adalah bahwa data yang dianalisis harus stasioner pada orde yang sama. Data yang tidak stasioner disebut memiliki akar unit dan kondisi ini akan menghasilkan estimasi yang tidak akurat tentang keterkaitan antar variabel. Karena itu, uji akar unit merupakan langkah penting yang harus dilakukan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penggunaan model dinamis VAR. Uji akar unit yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada uji akar unit data panel yang dalam hal ini menggunakan empat metode terdiri dari Levin, Lin & Chu, Im, Pesaran & Shin, ADF - Fisher X^2 , dan PP - Fisher X^2 . Tolok ukur suatu variabel dinyatakan mencapai kondisi stasioner didasarkan pada nilai *p-value* yang dihasilkan melalui perhitungan statistik. Jika *p-value* < 0,05 dapat diartikan bahwa variabel dinyatakan stasioner atau tidak memiliki akar unit. Sebaliknya jika *p-value* > 0,05 maka variabel dinyatakan tidak stasioner atau tidak memiliki akar unit.

Hasil uji akar unit untuk variabel Gini rasio sebagai ukuran ketimpangan pendapatan memperlihatkan nilai *p-value* yang berbeda untuk masing-masing metode pengujian. Pada data asli (level), hasil perhitungan statistik menggunakan metode LLC dan IPS dengan melibatkan *intercept* menunjukkan nilai *p-value* masing-masing sebesar 0,000 dan 0,275. Selanjutnya metode ADF - Fisher X^2 dan PP Fisher X^2 menghasilkan nilai *p-value* masing-masing sebesar 0,279 dan 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa berdasarkan metode LLC dan PP-Fisher X^2 variabel gini rasio dinyatakan sudah mencapai stasioner. Sebaliknya, berdasarkan metode IPS dan ADF- Fisher X^2 data tersebut belum dapat dinyatakan stasioner. Pengujian yang sama dengan melibatkan *intercept* dan *trend* juga memberikan kesimpulan yang belum memadai. Metode LLC, ADF-Fisher X^2 dan PP-Fisher X^2 menunjukkan nilai *p-value* masing-masing dibawah 0,05. Sehingga menurut ketiga metode tersebut, data gini rasio sudah mencapai stasioner. Sebaliknya, metode IPS menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0,186 > 0,05 yang mengindikasikan bahwa menurut metode tersebut data gini rasio belum stasioner. Untuk

lebih jelasnya mengenai ringkasan hasil uji akar unit ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan hasil uji akar unit

No	Variable	Test for unit root in	Methods	Individual Intercept		Intercept & Trend	
				T-stat	P-value	T-stat	P-value
1	Ketimpangan pendapatan (logGR)	Level	Levin, Lin & Chu	-3,924	0,000	-14,127	0,000
			Im, Pesaran & Shin	-0,598	0,275	-0,891	0,186
			ADF - Fisher X ²	51,152	0,279	67,207	0,022
			PP - Fisher X ²	96,363	0,000	111,67	0,000
		1 st difference	Levin, Lin & Chu	-13,790	0,000	-19,117	0,000
			Im, Pesaran & Shin	-4,072	0,000	-7,002	0,000
			ADF - Fisher X ²	97,174	0,000	71,321	0,001
			PP - Fisher X ²	166,284	0,000	101,721	0,000
2	Pendapatan per kapita (logPDRB)	Level	Levin, Lin & Chu	-0,627	0,266	-12,702	0,000
			Im, Pesaran & Shin	4,709	1,000	0,294	0,616
			ADF - Fisher X ²	15,629	1,000	51,668	0,262
			PP - Fisher X ²	23,312	0,998	80,391	0,001
		1 st difference	Levin, Lin & Chu	-11,565	0,000	-12,213	0,000
			Im, Pesaran & Shin	-1,226	0,110	-2,254	0,012
			ADF - Fisher X ²	63,581	0,044	18,015	0,021
			PP - Fisher X ²	104,911	0,000	72,442	0,007
3	Jumlah Mesjid (LogMSJ)	Level	Levin, Lin & Chu	2,053	0,980	11,855	0,032
			Im, Pesaran & Shin	2,205	0,986	22,877	0,003
			ADF - Fisher X ²	6,346	0,984	18,404	0,000
			PP - Fisher X ²	3,768	0,999	14,092	0,000
		1 st difference	Levin, Lin & Chu	0,656	0,744	42,849	0,000
			Im, Pesaran & Shin	0,933	0,824	41,793	0,000
			ADF - Fisher X ²	3,018	0,933	40,293	0,000
			PP - Fisher X ²	14,392	0,072	24,677	0,000
4	Jumlah Pesantren (logPSTR)	Level	Levin, Lin & Chu	-66,693	0,000	-0,430	0,666
			Im, Pesaran & Shin	-9,326	0,000	-0,686	0,246
			ADF - Fisher X ²	39,141	0,026	42,739	0,021
			PP - Fisher X ²	32,276	0,013	68,378	0,000
		1 st difference	Levin, Lin & Chu	11,731	0,008	43,881	0,000
			Im, Pesaran & Shin	-3,228	0,000	-5,053	0,000
			ADF - Fisher X ²	47,361	0,001	49,755	0,000
			PP - Fisher X ²	85,118	0,000	5,553	0,000
5	Jumlah Santri (logSTR)	Level	Levin, Lin & Chu	-5,056	0,000	-16,832	0,000
			Im, Pesaran & Shin	-2,433	0,008	-3,641	0,000
			ADF - Fisher X ²	79,618	0,002	64,705	0,036
			PP - Fisher X ²	125,888	0,000	100,772	0,000
		1 st difference	Levin, Lin & Chu	-15,650	0,000	-50,873	0,000
			Im, Pesaran & Shin	-4,212	0,000	-5,217	0,000
			ADF - Fisher X ²	99,989	0,000	14,329	0,012
			PP - Fisher X ²	161,384	0,000	2,916	0,061

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan Eviews 10.

Catan: Nilai p-value < 0,05 mengindikasikan signifikan pada keyakinan 95%, dan nilai p-value < 0,10 mengindikasikan signifikan pada keyakinan 90%.

Belum adanya kesimpulan yang seragam tentang kondisi stasioneritas data Gini rasio berdasarkan masing-masing metode pengujian, berimplikasi bahwa pengujian dilakukan pada data beda pertama (*first difference*). Hasil pengujian statistik menghasilkan nilai *p-value* $< 0,05$ untuk keempat metode. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data gini rasio mencapai stasioner pada *first difference*.

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa pada data asli (level), hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa sebagian nilai *p-value* lebih besar dari 0,05. Selanjutnya pada data beda pertama (*first difference*) seluruh nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti seluruh variabel dinyatakan stasioner pada *first difference*.

F. Hasil Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dalam penelitian ini menggunakan uji kointegrasi data panel. Metode yang digunakan mengacu pada *Pedroni's cointegration test* yang didasarkan pada Engle dan Granger. Berhubung uji kointegrasi dilakukan terhadap data panel, maka kointegrasi yang dimaksudkan dapat dilihat dari dua aspek yaitu *within-dimension* dan *between-dimension*. Kointegrasi "*within-dimension*" merupakan gejala adanya hubungan jangka panjang antara variabel yang sama pada *cross-section* berbeda yang dalam hal ini adalah kabupaten kota di Aceh. Selanjutnya kointegrasi "*between-dimension*" adalah gejala adanya hubungan jangka panjang antara sesama variabel di daerah yang sama. Secara ekonometrik, pemanfaatan *Pedroni's cointegration test* pada dua aspek pengujian tersebut menghasilkan nilai Panel *v-Statistic*, Panel *rho-statistik*, panel *PP-statistik*, *group rho-statistic* dan *group PP-statistic*. Kondisi kointegrasi wujud ketika nilai *p-value* masing-masing nilai statistik tersebut lebih kecil dari 0,05. Kondisi sebaliknya mengindikasikan tidak adanya gejala kointegrasi. Hasil uji kointegrasi seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pedroni's co-integration test

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)				
	Statistic	p-value	Weighted Statistic	p-value
Panel v-Statistic	-1,941	0,974	-3,216	0,999
Panel rho-Statistic	2,921	0,998	2,956	0,998
Panel PP-Statistic	-6,804	0,000	-13,556	0,000
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)				
Group rho-Statistic	4,706	1,000		
Group PP-Statistic	-17,656	0,000		

Note: Nilai p-value < 0,05 berarti signifikan pada keyakinan 95%

Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa nilai *p-value* untuk panel v-statistik, panel rho-statistik dan group rho-statistic lebih besar dari 0,05, dan hanya panel PP-statistic dan group PP-statistic yang menghasilkan p-lebih kecil 0,05. Mengingat hanya panel PP dan group PP statistic yang memenuhi syarat, maka belum dapat disimpulkan adanya kointegrasi. Dengan kata lain, hasil perhitungan ekonometrik belum dapat memberikan kesimpulan tentang adanya hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan religiusitas ke-islaman. Karena itu, model analisis yang diaplikasikan untuk menganalisis keterkaitan antara ketiga variabel tersebut adalah *panel vector autoregressive* (PVAR).

G. Hasil Lag Optimum

Penggunaan metode VAR untuk menganalisis data memerlukan adanya penentuan lag optimum. Lag optimum adalah durasi waktu yang memungkinkan suatu variabel memberikan pengaruh optimal terhadap variabel lain. Hasil penentuan lag optimum berkaitan dengan hubungan kausalitas antara ketimpangan pendapatan, pendapatan per kapita dan tiga variabel religiusitas keislaman (jumlah mesjid, pesantren dan jumlah santri seperti ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil penentuan lag optimum.

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	141,3069	NA	7,78e-11	-9,087124	-8,853591	-9,012414
1	171,9359	49,00649	5,50e-11	-9,462394	-8,061197	-9,014139
2	249,6776	98,47287*	1,90e-12*	-12,97851	-10,40965*	-12,15671*
3	273,6485	22,37284	3,15e-12	-12,90990	-9,173377	-11,71456
4	300,8457	16,31830	7,83e-12	-13,05638*	-8,152190	-11,48749

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan Eviews 10.

Berdasarkan hasil penentuan lag optimum seperti ditunjukkan dalam tabel 3 di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa durasi waktu optimum suatu variabel dapat memberikan pengaruh optimal terhadap variabel lain adalah dalam horizon waktu 4 periode. Hal ini ditunjukkan oleh nilai AIC terendah sebesar -13,056. Sehingga penggunaan VAR untuk menganalisis hubungan kausalitas antar variabel menggunakan lag 4.

H. Hasil Panel Vector Autoregressive

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menganalisis keterkaitan antara religiusitas keislaman (yang diukur dari tiga dimensi yakni jumlah mesjid, pesantren dan jumlah santri) dengan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Guna mempertajam analisis mengenai keterkaitan antar variabel-variabel tersebut, peneliti membagi kabupaten kota di Aceh menjadi dua kelompok yaitu daerah dengan tingkat ketimpangan tinggi dan daerah dengan tingkat ketimpangan rendah. Dalam kajian ini, suatu daerah dikatakan memiliki ketimpangan relatif tinggi jika memiliki *gini ratio* di atas 0,30. Sebaliknya dengan ketimpangan relatif rendah memiliki *gini ratio* di bawah 0,30. Menggunakan data tahun 2017, daerah dengan ketimpangan relatif tinggi adalah kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie, Bireuen dan kabupaten Gayo Lues serta kota Banda Aceh, Langsa dan kota Subulussalam. Sebaliknya, 13 daerah kabupaten kota lainnya dikategorikan memiliki ketimpangan relatif rendah.

Hasil PVAR untuk daerah dengan ketimpangan tinggi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu (t) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pertumbuhan ekonomi empat tahun sebelumnya (t-4). Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan antar waktu. Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat pada periode tahun tertentu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mereka pada periode tahun berikutnya. Semakin tinggi nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tahun tertentu, semakin tinggi pula pendapatan yang mereka peroleh pada periode berikutnya.

Dimensi religiusitas keislaman dalam bentuk mesjid (rumah ibadah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam horizon waktu 2 periode dengan koefisien estimasi sebesar 1,465 dengan t stat = 9,872 ($> 1,96$). Adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut secara implisit menjelaskan bahwa di daerah dengan tingkat ketimpangan relatif tinggi, perkembangan pendapatan rata-rata masyarakat bergerak searah dengan perkembangan jumlah mesjid. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Qayyum et al. (2019) yang juga membuktikan bahwa keberadaan rumah ibadah sebagai proxi dari religiusitas berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi. Ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma agama berdampak terhadap pola hidup dan perilaku mereka termasuk dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Ohlmann & Huttel (2018) tentang dampak ekonomi religiusitas komunitas kristen di sejumlah negara Afrika yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara religiusitas dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, temuan ini bertolak belakang dengan kesimpulan penelitian Barro & McCleary (2003) yang juga mengangkat kasus komunitas kristen yang mengungkapkan bahwa keberadaan gereja yang diiringi dengan

meningkatnya kehadiran masyarakat di rumah ibadah tersebut berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, pesantren justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam horizon waktu 1 periode. Secara statistik, informasi ini ditunjukkan oleh koefisien estimasi sebesar $-0,028$ dengan t stat = $-2,090$ ($> 1,96$). Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah dengan tingkat ketimpangan relatif tinggi, eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan islam belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Dimensi religiusitas lainnya yakni jumlah santri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, di daerah dengan ketimpangan relatif tinggi, peningkatan atau pun penurunan jumlah santri di suatu daerah tidak secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Hal ini secara statistik menginformasikan bahwa perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah, tidak terkait dengan keberadaan santri. Kendatipun sejumlah daerah di Aceh memiliki jumlah santri relatif lebih banyak di bandingkan daerah lainnya, kondisi tersebut tidak berdampak secara nyata terhadap perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya ketika menempatkan ketimpangan pendapatan sebagai endogenous variable, hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan pada periode tahun tertentu secara negatif dan signifikan dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan periode tahun sebelumnya, dengan koefisien estimasi sebesar $-1,479$ dan t statistik sebesar $-3,071$ ($> 1,96$). Terjadinya peningkatan kesenjangan antara kaya dan miskin menjadi salah satu faktor pendorong bagi masyarakat terutama mereka yang berpendapatan rendah agar dapat hidup lebih baik. Motivasi internal untuk meningkatkan taraf hidup, disertai dengan efek positif pengalokasian anggaran pemerintah untuk pembangunan ekonomi, secara signifikan mampu memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai

hasil PVAR yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan dimensi religiusitas ke-islaman dapat dilihat Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan PVAR untuk daerah dengan ketimpangan tinggi

Endogenous Variable	Exogenous Variable				
	Δ LGR	Δ LMSJ	Δ LPDRB	Δ LPSTR	Δ LSTR
Δ LGR(-1)	-1,479 [-3,071]	-0,384 [-1,445]	0,018 [0,530]	0,086 [0,099]	-0,059 [-0,061]
Δ LGR(-2)	-0,411 [-1,171]	0,329 [1,701]	-0,051 [-2,032]	-1,073 [-1,692]	-0,287 [-0,403]
Δ LGR(-3)	-0,913 [-1,605]	0,123 [0,393]	0,029 [0,696]	-0,308 [-0,299]	0,808 [0,699]
Δ LGR(-4)	-0,846 [-1,725]	0,035 [0,129]	0,016 [0,468]	-0,028 [-0,032]	0,615 [0,619]
Δ LMSJ(-1)	-0,301 [-0,118]	-2,671 [-1,901]	0,215 [1,171]	2,174 [0,472]	6,383 [1,233]
Δ LMSJ(-2)	-1,496 [-0,727]	-0,741 [-0,653]	1,465 [9,872]	6,962 [1,872]	-2,071 [-0,496]
Δ LMSJ(-3)	-1,559 [-1,505]	-0,419 [-0,734]	0,091 [1,215]	1,018 [0,544]	1,994 [0,948]
Δ LMSJ(-4)	0,379 [0,516]	0,175 [0,433]	-0,002 [-0,043]	-0,095 [-0,072]	0,135 [0,091]
Δ LPDRB(-1)	-9,331 [-1,546]	1,1150 [0,335]	0,466 [1,069]	17,139 [1,572]	-0,518 [-0,042]
Δ LPDRB(-2)	2,044 [0,325]	-1,978 [-0,571]	0,360 [0,794]	-20,333 [-1,790]	20,487 [1,605]
Δ LPDRB(-3)	12,044 [1,499]	2,873 [0,648]	-0,830 [-1,433]	-6,850 [-0,472]	-15,286 [-0,937]
Δ LPDRB(-4)	-8,042 [-1,279]	-4,042 [-1,166]	0,948 [2,091]	12,889 [1,135]	7,308 [0,573]
Δ LPSTR(-1)	0,030 [0,163]	0,151 [1,483]	-0,028 [-2,090]	0,064 [0,191]	-0,469 [-1,249]
Δ LPSTR(-2)	0,532 [1,285]	-0,002 [-0,009]	-0,042 [-1,391]	0,001 [0,002]	-1,454 [-1,729]
Δ LPSTR(-3)	0,381 [1,410]	0,084 [0,561]	-0,015 [-0,769]	-0,280 [-0,574]	-0,463 [-0,845]
Δ LPSTR(-4)	-0,047 [-0,305]	0,061 [0,714]	-0,001 [-0,079]	-0,278 [-1,001]	-0,176 [-0,565]
Δ LSTR(-1)	0,109 [0,600]	-0,136 [-1,343]	0,002 [0,147]	0,211 [0,638]	-0,223 [-0,600]
Δ LSTR(-2)	0,155 [0,768]	-0,077 [-0,694]	-0,011 [-0,768]	0,002 [0,005]	-0,567 [-1,381]
Δ LSTR(-3)	-0,003 [-0,016]	0,011 [0,128]	-0,008 [-0,768]	-0,012 [-0,044]	-0,102 [-0,327]
Δ LSTR(-4)	-0,329 [-1,865]	-0,078 [-0,799]	0,007 [0,545]	0,008 [0,025]	-0,051 [-0,144]
C	0,164 [1,255]	0,084 [1,167]	0,008 0,886]	0,065 [0,275]	-0,088 [-0,331]
R-squared	0,737	0,806	0,939	0,833	0,799
Adj. R-squared	0,153	0,374	0,805	0,461	0,351

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan Eviews 10.

Catatan: Angka dalam [] adalah nilai t-statistik, nilai t statistik > 1,96 mengindikasikan signifikan pada keyakinan 95%.

Dimensi religiusitas memiliki pengaruh yang ambigu terhadap ketimpangan pendapatan. Perkembangan jumlah mesjid dan santri berpengaruh negatif, sedangkan keberadaan pesantren justru berpengaruh positif. Namun pengaruh ketiga dimensi tersebut tidak signifikan. Terjadinya perubahan dalam ketiga dimensi religiusitas tersebut tidak secara nyata mampu memperbaiki distribusi pendapatan di daerah dengan ketimpangan tinggi. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Naveed & Wang (2017) yang menyimpulkan bahwa religiusitas keislaman mampu menurunkan ketimpangan pendapatan secara umum.

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 5 di atas, ketika menempatkan dimensi religiusitas ke-islaman sebagai variabel endogen, hasil pengujian statistik tidak menemukan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap masing-masing dimensi. Informasi ini secara statistik dapat diartikan bahwa di daerah dengan ketimpangan pendapatan relatif tinggi, peningkatan atau pun penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap religiusitas ke-islaman, baik dilihat dari dimensi mesjid (rumah ibadah), pesantren (lembaga pendidikan islam) maupun jumlah santri. Demikian pula halnya dengan ketimpangan pendapatan, juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masing-masing dimensi religiusitas tersebut. Tingkat religiusitas ke-islaman di daerah dengan ketimpangan relatif tinggi tidak terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Hasil PVAR untuk daerah dengan ketimpangan rendah (Tabel 6) menginformasikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tahun tertentu (t) dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan ekonomi periode tahun sebelumnya ($t-1$) dan ketimpangan pendapatan dua tahun sebelumnya ($t-2$). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat di suatu daerah memiliki keterkaitan antar

waktu. Kemampuan mereka dalam melakukan kegiatan produksi pada periode tahun tertentu secara signifikan terkait dengan kemampuan produksi tahun sebelumnya. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan pada periode tahun tertentu secara nyata berdampak pada pendapatan periode berikutnya.

Ketimpangan pendapatan juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan ketimpangan relatif tinggi akan memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi. Pengaruh positif dan signifikan ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi pada horizon waktu 2 periode. Artinya, peningkatan ketimpangan pendapatan pada periode tahun t akan berdampak signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dua periode berikutnya ($t+2$).

Dimensi religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien estimasi mesjid, pesantren dan santri menunjukkan angka negatif, namun tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan religiusitas keislaman masyarakat yang didasarkan pada tiga dimensi tersebut tidak secara nyata mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka. Keberadaan mesjid yang disertai dengan kesadaran pentingnya kegiatan ibadah bagi masyarakat muslim, tidak secara signifikan berdampak pada pendapatan masyarakat. Demikian juga halnya dengan keberadaan pesantren dan eksistensi santri dalam menjalani pendidikan keagamaan di daerah kabupaten kota, juga tidak berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Ringkasan hasil PVAR untuk daerah dengan ketimpangan rendah seperti terlihat dalam Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan PVAR untuk daerah dengan ketimpangan rendah

Endogenous Variable	Exogenous Variable				
	Δ LGR	Δ LMSJ	Δ LPDRB	Δ LPSTR	Δ LSTR
Δ LGR(-1)	-0,389 [-1,709]	-0,325 [-2,221]	0,001 [0,012]	0,377 [2,509]	0,439 [1,678]
Δ LGR(-2)	-0,569 [-2,342]	-0,321 [-2,061]	0,160 [2,067]	0,406 [2,533]	0,733 [2,624]
Δ LGR(-3)	-0,346 [-1,545]	-0,199 [-1,386]	-0,093 [-1,315]	0,149 [1,011]	0,762 [2,963]
Δ LGR(-4)	-0,373 [-1,523]	-0,219 [-1,397]	0,045 [0,581]	-0,187 [-1,156]	-0,008 [-0,029]
Δ LMSJ(-1)	-0,185 [-0,409]	-0,391 [-1,347]	-0,085 [-0,585]	0,516 [1,723]	0,224 [0,429]
Δ LMSJ(-2)	-0,709 [-1,208]	-0,026 [-0,069]	0,190 [1,016]	0,307 [0,794]	1,487 [2,204]
Δ LMSJ(-3)	0,234 [0,426]	-0,358 [-1,017]	-0,191 [-1,089]	0,028 [0,076]	1,018 [1,612]
Δ LMSJ(-4)	-0,602 [-0,708]	-0,507 [-0,931]	-0,249 [-0,919]	0,712 [1,268]	-0,709 [-0,726]
Δ LPDRB(-1)	-0,431 [-0,679]	-0,378 [-0,931]	0,758 [3,739]	-0,421 [-1,006]	-0,451 [-0,618]
Δ LPDRB(-2)	-1,212 [-1,017]	1,015 [1,329]	-0,268 [-0,703]	0,009 [0,011]	-2,772 [-2,022]
Δ LPDRB(-3)	4,477 [1,768]	-1,356 [-0,835]	-0,131 [-0,162]	0,616 [0,369]	8,796 [3,020]
Δ LPDRB(-4)	0,269 [0,115]	2,636 [1,757]	0,593 [0,793]	-1,314 [-0,851]	-3,275 [-1,217]
Δ LPSTR(-1)	0,684 [1,844]	0,115 [0,483]	-0,037 [-0,311]	-0,459 [-1,874]	-0,817 [-1,913]
Δ LPSTR(-2)	0,044 [0,275]	0,019 [0,187]	-0,058 [-1,131]	-0,079 [-0,746]	-1,029 [-5,589]
Δ LPSTR(-3)	-0,203 [-1,063]	-0,043 [-0,354]	0,054 [0,889]	0,084 [0,668]	0,076 [0,346]
Δ LPSTR(-4)	-0,256 [-2,048]	0,068 [0,854]	0,003 [0,071]	-0,029 [-0,359]	0,327 [2,271]
Δ LSTR(-1)	-0,295 [-1,696]	-0,079 [-0,710]	-0,001 [-0,008]	0,203 [1,762]	0,297 [1,482]
Δ LSTR(-2)	-0,022 [-0,160]	0,001 [0,017]	0,036 [0,825]	0,030 [0,339]	0,043 [0,278]
Δ LSTR(-3)	-0,043 [-0,321]	0,102 [1,197]	-0,033 [-0,781]	0,073 [0,829]	-0,318 [-2,071]
Δ LSTR(-4)	-0,059 [-0,514]	-0,022 [-0,299]	0,002 [0,058]	0,024 [0,319]	-0,044 [-0,328]
C	0,017 [0,391]	0,046 [1,661]	0,001 [0,105]	0,003 [0,097]	-0,031 [-0,615]
R-squared	0,710	0,502	0,835	0,686	0,789
Adj. R-squared	0,388	-0,050	0,652	0,336	0,555

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan Eviews 10.

Catatan: Angka dalam [] adalah nilai t-statistik.

Seperti dalam Tabel 6 di atas, di daerah dengan ketimpangan rendah, tidak satu pun di antara ketiga dimensi religiusitas keislaman yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan

ini bertolak belakang dengan temuan penelitian Beck & Gundersen (2016) di Ghana yang menyimpulkan bahwa dominasi religiusitas yang ditandai dengan partisipasi aktif dalam menjalankan ibadah berhubungan erat dengan pendapatan rumah tangga.

Ketimpangan pendapatan secara negatif dan signifikan dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan dalam horizon waktu dua periode. Artinya, penurunan ketimpangan pendapatan pada periode tahun tertentu dipengaruhi kenaikan ketimpangan pendapatan dua tahun sebelumnya. Adanya hubungan negatif dan signifikan ini mengindikasikan bahwa adanya ketimpangan kaya dan miskin mendorong sebagian kelompok masyarakat terutama mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan untuk selalu berupaya meningkatkan taraf hidup mereka. Ketimpangan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya keinginan untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Dengan menempatkan dimensi religiusitas keislaman sebagai endogen variabel diperoleh informasi bahwa ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap masing-masing dimensi. Di daerah dengan distribusi pendapatan relatif merata, ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perkembangan jumlah mesjid, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan jumlah pesantren dan santri. Meskipun ketimpangan pengaruh yang tidak sama terhadap masing-masing dimensi religiusitas keislaman, temuan ini memperkuat hasil penelitian Hekmatpour (2020) di sejumlah negara berkembang yang menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan determinan utama religiusitas masyarakat. Dampak ketimpangan pendapatan terhadap religiusitas lebih nyata pada masyarakat berpendapatan rendah dibandingkan dengan masyarakat berpendapatan menengah ke atas.

Adanya pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan terhadap religiusitas keislaman (dimensi pesantren dan santri)

mendukung hasil kajian Solt et al. (2011) di Amerika yang juga mengungkapkan bahwa ketimpangan ekonomi memiliki pengaruh kuat dan positif terhadap religiusitas, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Temuan ini juga sejalan dengan temuan penelitian Jordan (2014) menggunakan data panel 19 negara barat yang juga menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara ketimpangan pendapatan dan agama. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan ketimpangan tinggi lebih religius dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah dengan ketimpangan rendah. Alasan yang mendasari kondisi tersebut sejalan dengan *insecurity theory* yang berargumen bahwa ketimpangan yang tinggi menimbulkan rasa kurang nyaman di masyarakat yang kemudian mendorong kelompok miskin berupaya mendapatkan ketenangan psikologis melalui nilai-nilai religiusitas (Jordan, 2014).

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap perkembangan jumlah santri, tetapi tidak terhadap jumlah mesjid dan pesantren. Temuan ini menginformasikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, tidak secara nyata berdampak pada peningkatan religiusitas ke-islaman di daerah tersebut, kecuali hanya pada dimensi jumlah santri. Menariknya, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap perkembangan santri menyajikan informasi yang ambigu. Dalam horizon waktu 2 periode, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap perkembangan jumlah santri adalah negatif dan signifikan. Sebaliknya, dalam horizon waktu 3 periode, pengaruh tersebut positif dan signifikan.

I. Analisis Kausalitas Antar variabel

Kausalitas antar dua variabel terjadi ketika nilai prediksi suatu variabel meningkat ketika menggunakan nilai masa lalu variabel lainnya sebagai *preditor variable* (Roebroeck, 2015). Suatu variabel Y dikatakan *Granger-causes* terhadap variabel Z, jika prediksi nilai variabel Z

meningkat ketika menggunakan nilai masa lalu variabel Y. Demikian pula sebaliknya, variabel Z dikatakan Granger-causes terhadap variabel Y ketika prediksi nilai variabel Z tersebut meningkat ketika menggunakan nilai masa lalu variabel Y sebagai *predictor variable*. Karena itu, uji kausalitas menghasilkan tiga kemungkinan terdiri dari kausalitas satu arah (*uni directional causality*), kausalitas dua arah (*bidirectional causality*) dan tidak ada kausalitas sama sekali. Dalam kemungkinan ketiga, prediksi nilai suatu variabel tidak secara nyata disebabkan oleh nilai masa lalu variabel lainnya.

Untuk menguji arah kausalitas antara dimensi religiusitas keislaman dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan digunakan *granger causality test*. Model analisis ini juga dapat memberikan informasi statistik mengenai signifikansi respon suatu variabel terhadap perubahan yang terjadi pada variabel lain. Ringkasan hasil uji tersebut untuk daerah dengan ketimpangan rendah dan ketimpangan tinggi seperti ditunjukkan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Ringkasan *Granger causality tests* daerah dengan ketimpangan tinggi

Endogenous Variables	Exogenous Variables				
	Δ LGR	Δ LMSJ	Δ LPDRB	Δ LPSTR	Δ LSTR
Δ LGR	-	(2,849) [0,583]	(4,259) [0,372]	(3,127) [0,537]	(4,073) [0,396]
Δ LMSJ	(12,453)** [0,014]	-	(2,191) [0,701]	(4,491) [0,344]	(5,787) [0,216]
Δ LPDRB	(5,112) [0,276]	(101,407)** [0,000]	-	(4,758) [0,313]	(2,864) [0,581]
Δ LPSTR	(3,491) [0,479]	(4,007) [0,405]	(9,961)* [0,041]	-	(1,132) [0,889]
Δ LSTR	(1,667) [0,797]	(2,989) [0,559]	(3,443) [0,487]	(3,598) [0,463]	-

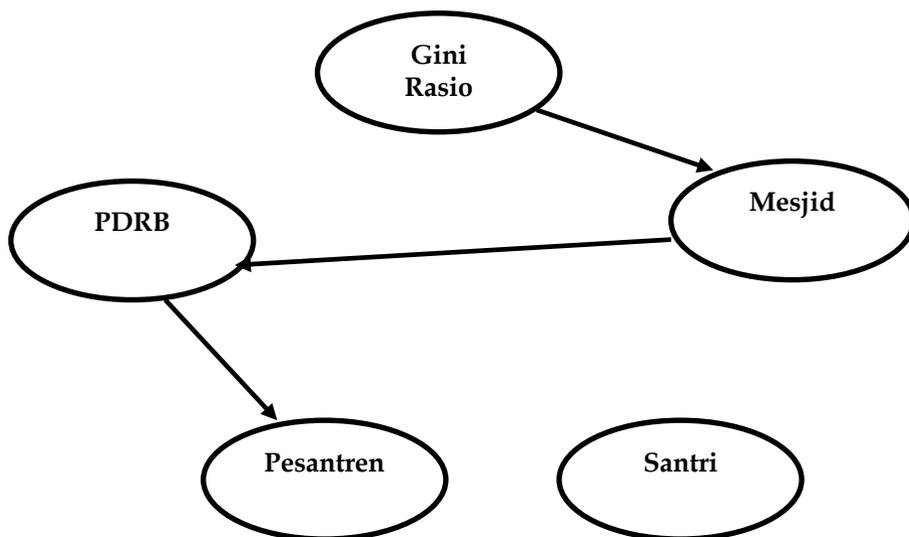
Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan Eviews 10.

Note: Angka dalam () adalah nilai chi-square, dan dalam [] nilai p-value.

* signifikan pada keyakinan 95%, ** signifikan pada keyakinan 95,5%

Berdasarkan Tabel 7 di atas, maka arah kausalitas antara dimensi religiusitas keislaman dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan

pendapatan di daerah dengan ketimpangan tinggi seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.8.



Gambar 4.8

Arah kausalitas antar variabel di daerah dengan ketimpangan tinggi

Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 4.8 di atas dapat dilihat bahwa di daerah dengan ketimpangan relatif tinggi, kausalitas satu arah terjadi dari ketimpangan pendapatan ke jumlah mesjid, dari jumlah mesjid ke pertumbuhan ekonomi, dan dari pertumbuhan ekonomi ke jumlah pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan jumlah mesjid suatu daerah merupakan respon terhadap ketimpangan pendapatan. Adanya, penurunan dan kenaikan ketimpangan kaya dan miskin di suatu daerah kabupaten kota, berdampak pada perkembangan jumlah mesjid di daerah tersebut. Dengan kata lain, ketimpangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat mendorong religiusitas ke-islaman dari dimensi mesjid. Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian Solt et al. (2011) yang menyimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap religiusitas masyarakat.

Adanya kausalitas dari ketimpangan pendapatan ke jumlah mesjid juga dapat dijelaskan melalui alasan kemampuan ekonomi masyarakat secara umum. Pembangunan rumah ibadah tersebut membutuhkan dana relatif besar dan memerlukan kontribusi masyarakat. Di daerah dengan ketimpangan tinggi biasanya sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan relatif besar dibanding kelompok lainnya. Sehingga kemampuan masyarakat untuk mendirikan rumah ibadah tersebut juga meningkat. Hal inilah yang menyebabkan adanya kausalitas satu arah dari ketimpangan pendapatan ke religiusitas keislaman dimensi mesjid.

Kausalitas satu arah juga terjadi dari jumlah mesjid ke pertumbuhan ekonomi. Keberadaan mesjid di suatu daerah berkorelasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut yang kemudian mempengaruhi pendapatan mereka. Daerah dengan jumlah mesjid relatif banyak mengindikasikan bahwa religiusitas keislaman di daerah itu relatif lebih baik dan kondisi tersebut berdampak pada kinerja ekonomi daerah secara umum. Jumlah mesjid di suatu daerah merefleksikan partipasi masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam terutama berkaitan dengan ibadah shalat. Peningkatan jumlah rumah ibadah tersebut secara implisit dapat dimaknai bahwa keyakinan religius (*religious belief*) masyarakat juga meningkat. Masyarakat dengan *religious belief* relatif lebih baik terbukti memiliki tingkat kesungguhan yang juga lebih baik dalam bekerja (Cuomo et al., 2020). Bahkan religiusitas seseorang muslim secara nyata dapat berdampak pada keterikatannya terhadap pekerjaan (Abu Bakar et al., 2016), dan tingkat spritualitas seseorang sebagai bagian dari dimensi religiusitas seperti tingkat partisipasi seseorang melaksanakan ibadah berdampak signifikan pada capaian hasil kerjanya (Moon et al., 2018). Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan nilai produksi barang dan jasa di masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kausalitas dari mesjid ke pertumbuhan ekonomi seperti dijelaskan di atas,

mengkonfirmasi temuan ini mengkonfirmasi kajian Carvalho et al. (2019) yang juga membuktikan adanya kausalitas antara religiusitas dengan kinerja perekonomian.

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.8 di atas, kausalitas satu arah juga terjadi dari pertumbuhan ekonomi religiusitas keislaman dimensi pesantren. Hasil statistik ini mengindikasikan bahwa perubahan jumlah pesantren di suatu daerah juga terkait dengan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Bahkan kehadiran pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal islam merupakan respon terhadap perkembangan pendapatan masyarakat.

Hasil *Granger causality test* terhadap keterkaitan antara dimensi religiusitas keislaman dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan untuk kabupaten kota dengan ketimpangan rendah menunjukkan hasil statistik yang agak berbeda dibandingkan daerah dengan ketimpangan tinggi. Ringkasan hasil tes tersebut seperti ditunjukkan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Ringkasan *Granger causality tests* daerah dengan ketimpangan rendah

<i>Endogenous Variables</i>	<i>Exogenous Variables</i>				
	ΔLGR	$\Delta LMSJ$	$\Delta LPDRB$	$\Delta LPSTR$	$\Delta LSTR$
ΔLGR	-	(3,068) [0,547]	(0,547) [0,126]	(7,312) [0,120]	(4,431) [0,351]
$\Delta LMSJ$	(7,474) [0,113]	-	(10,186)* [0,037]	(1,209) [0,877]	(1,803) [0,772]
$\Delta LPDRB$	(18,305)* [0,001]	(4,122) [0,389]	-	(2,121) [0,714]	(2,173) [0,704]
$\Delta LPSTR$	(10,842)* [0,028]	(5,164) [0,271]	(4,029) [0,402]	-	(5,267) [0,261]
$\Delta LSTR$	(0,694)* [0,030]	(7,323) [0,119]	(10,044)* [0,039]	(36,773)** [0,000]	-

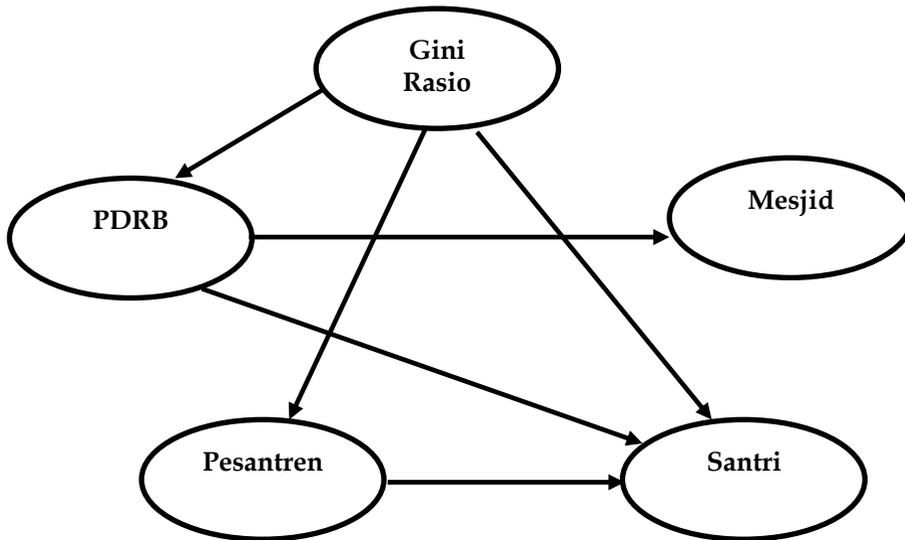
Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan Eviews 10.

Note: Angka dalam () adalah nilai chi-square, dan dalam [] nilai p-value.

* signifikan pada keyakinan 95%, ** signifikan pada keyakinan 95,5%

Berdasarkan Tabel 8 di atas, maka arah kausalitas antara dimensi religiusitas keislaman dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan

pendapatan di daerah dengan ketimpangan tinggi seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.14.



Gambar 4.9

Arah kausalitas antar variabel di daerah dengan ketimpangan rendah

Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 4.9 di atas diperoleh informasi statistik bahwa di daerah kabupaten kota dengan ketimpangan relatif rendah, terdapat kausalitas satu arah dari ketimpangan pendapatan ke pendapatan per kapita, jumlah pesantren dan jumlah santri. Selain itu kausalitas satu arah juga terjadi dari pendapatan per kapita ke jumlah mesjid dan jumlah santri dan dari jumlah pesantren ke jumlah santri. Adanya kausalitas antara dimensi religiusitas ke islaman dengan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mengkonfirmasi hasil penelitian Shah et al. (2020) tentang keterkaitan antara religiusitas dan pertumbuhan ekonomi yang mengungkapkan bahwa religiusitas berdampak pada budaya dan modal sosial masyarakat yang kemudian mempengaruhi kegiatan ekonomi. Religiusitas keislaman berdampak pada perilaku dan keyakinan muslim yang pada gilirannya

mempengaruhi mereka dalam bekerja terutama dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Zelekha, 2014). Hal inilah yang menyebabkan adanya kausalitas dari dimensi religiusitas keislaman ke pendapatan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah juga meningkat. Namun demikian, seiring dengan peningkatan kesejahteraan, ketimpangan pendapatan di masyarakat juga semakin melebar. Artinya, kesenjangan (*gap*) antara kaya dan miskin semakin lebar. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan perbaikan distribusi pendapatan di masyarakat.
2. Tingkat religiusitas keislaman masyarakat kabupaten kota di Aceh juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikasi ini terlihat dari perkembangan jumlah mesjid (rumah ibadah), pesantren (lembaga pendidikan Islam) dan perkembangan jumlah santri.
3. Di daerah dengan ketimpangan relatif tinggi, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak dipengaruhi oleh religiusitas keislaman. Kecuali pesantren berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa keberadaan pesantren belum secara nyata berkontribusi bagi perbaikan pendapatan masyarakat. Dilain pihak, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan juga tidak berpengaruh terhadap religiusitas keislaman. Kausalitas satu arah terjadi dari ketimpangan pendapatan ke perkembangan jumlah mesjid, dari pertumbuhan ekonomi ke

perkembangan jumlah pesantren dan dari perkembangan jumlah mesjid ke pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arah kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan religiusitas keislaman di daerah tersebut bersifat satu arah (*unidirectional causality*). Sedangkan arah kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan religiusitas keislaman bersifat dua arah (*bidirectional causality*).

4. Di daerah dengan ketimpangan relatif rendah, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi religiusitas keislaman. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap perkembangan jumlah pesantren dan santri, tetapi berpengaruh negatif terhadap perkembangan jumlah mesjid. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang ambigu terhadap perkembangan jumlah santri. Dalam horizon waktu dua tahun, pengaruh tersebut negatif dan signifikan. Sebaliknya, dalam horizon waktu tiga tahun pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah santri positif dan signifikan. Di lain pihak, religiusitas keislaman tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kausalitas satu arah (*unidirectional causality*) terjadi dari ketimpangan pendapatan ke pertumbuhan ekonomi dan ke dua dimensi religiusitas yakni jumlah pesantren dan jumlah santri. Terjadinya perubahan distribusi pendapatan di masyarakat, jumlah pesantren dan santri di kabupaten kota tertentu merupakan respon terhadap perubahan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Selain itu, kausalitas satu arah juga terjadi dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan jumlah mesjid dan santri. Peningkatan pendapatan masyarakat mendorong mereka untuk membangun rumah ibadah. Dalam waktu yang sama, kesadaran tentang pentingnya pendidikan islam juga meningkat.

B. Saran-saran

Mengacu pada kesimpulan di atas maka yang menjadi saran dan rekomendasi penelitian ini sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten kota di Aceh dipandang perlu melakukan intervensi kebijakan mengenai arah pembelajaran pada pesantren di Aceh terutama pesantren tradisional yang selama ini terkesan mengabaikan pentingnya pendidikan keterampilan bagi santri. Selama ini, pendidikan pesantren di Aceh secara umum lebih cenderung berorientasi pada pendidikan akhlak dan pengetahuan agama, sehingga belum berdampak signifikan pada perbaikan kondisi makro ekonomi daerah secara umum. Pembelajaran di pesantren juga penting memasukkan *vocational skill* dan *livelihood skill* sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan lulusan pesantren agar mampu memperoleh pekerjaan di masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak hanya memiliki pemahaman yang tinggi tentang akhlak dan ajaran Islam, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
2. Penelitian ini telah meletakkan dasar kajian mengenai keterkaitan antara dimensi religiusitas keislaman dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di kabupaten kota di Aceh. Peneliti akan datang yang tertarik untuk mengkaji hubungan fungsional antara variabel tersebut sebaiknya berupaya mengungkapkan saluran transmisi (*transmission channel*) pengaruh religiusitas keislaman terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga dapat diketahui “melalui jalur mana” masing-masing dimensi religiusitas keislaman berdampak signifikan pada kegiatan ekonomi, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan di masyarakat. Temuan tersebut tidak hanya berguna untuk memperkaya analisis hubungan fungsional dan kausalitas antara religiusitas keislaman dengan variabel-variabel

ekonomi, tetapi juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, R., Cooke, F. L., & Muenjohn, N. (2016). Religiosity as a source of influence on work engagement: a study of the Malaysian Finance industry. *The International Journal of Human Resource Management*, 1-27. doi:10.1080/09585192.2016.1254103
- Abu Raiya, H., Pargament, K. I., Mahoney, A., & Stein, C. (2008). A psychological measure of islamic religiousness: Development and evidence for reliability and validity. *The International Journal for the Psychology of Religion*, 18(4), 291-315. doi:10.1080/10508610802229270.
- Afonso, A., Schuknecht, L., & Tanzi. (2008). Income Distribution Determinants and Public Spending Efficiency, Working Paper Series No. 861, European Central Bank.
- Aji, H. M. (2018). *The effect of knowledge about halal and Islamic religiosity on attitude toward halal label*, Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding. 1, 1-8
- Amri, K. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan: Panel data 8 provinsi di Sumatera, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 1(1), 1-11.
- Amri, K. (2018). The macroeconomic impact of regional minimum wages: A cross-province data evidence from Indonesia, *Regional Science Inquiry* 10 (3), 163-176.
- Amri, K., & Aimon, H. (2017). Pengaruh pembentukan modal dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, *Economac*, 1(1), 1-16.
- Amri, K., & Nazamudin. (2018). Is there causality relationship between economic growth and income inequality? Panel data evidence from Indonesia, *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6(2), 8-20.
- Amri, K., Nazamuddin, Masbar, R., & Aimon, H. (2019). Is there a causality relationship between local tax revenue and regional economic growth? A panel data evidence from Indonesia, *Regional Science Inquiry* 11 (1), 73-84.
- Arsyad, L. (2009), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.

- Barro, R. J., & McCleary, R. M. (2003). Religion and economic growth across countries, *American Sociological Review*, 68(5), 760-781.
- Barro, R., & McCleary, R. (2001). Religion and economic growth, Washington DC: National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper 9682.
- Beck, S. V., & Gundersen, S. J. (2016). A gospel of prosperity? An analysis of the relationship between religion and earned income in Ghana, the most religious country in the world. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 55(1), 105-129. doi:10.1111/jssr.12247.
- Campante, F., & Yanagizawa-Drot, D. (2013). Does religion affect economic growth and happiness? Evidence from Ramadan, *Research Working Paper*, No. 13-052.
- Carvalho, J.-P., Iyer, S., & Rubin, J. (Eds.). (2019). *Advances in the Economics of Religion*. doi:10.1007/978-3-319-98848-1
- Casimir, A., Nwaoga, C. T., & Ogbozor, R. F. C. (2014). Religion, violence, poverty and underdevelopment in west Africa: Issues and challenges of Boko Haram phenomenon in Nigeria, *Open Journal of Philosophy*, 4(1), 59-67.
- Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. *Journal of International Money and Finance*, 20, 249-272.
- Cuomo, R. E., Davis, D. B., Goetz, S. J., Shapiro, J. D., & Walshok, M. L. (2020). *Religiosity and regional resilience to recession. risk, hazards & crisis in public policy*. doi:10.1002/rhc3.12189
- Crudu, R. (2015). The influence of fiscal policy on income inequality in European union's member states, *Verslo Sistemos Ir Ekonomika Business Systems And Economics*, 5(1), 46-60.
- Das, S., Sinha, G., & Mitra, T. K. (2014). Economic growth and income inequality: examining the links in Indian economy, *Journal of Quantitative Economics*, 12(1), 86-95.
- Doerrenberg, P., & Peichl, A. (2014). *The Impact of Redistributive Policies on Inequality in OECD Countries*, Discussion Paper No. 14-02, Zentrum Fur Europaische, Centre for European Economic Research.

- Elgin, C., Goksel, T., Gurdal, M. Y., & Orman, C. (2013). Religion, income inequality, and the size of the government, *Economic Modelling*, 30, 225-234.
- Engle, R. F., & Granger, C.W.J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing, *Econometrica*, 55(2), 251-276.
- Gallo, L. M., & Sagales, O. R. (2013). Joint determinants of fiscal policy, income inequality and economic growth, *Economic Modelling* 30, 814-824.
- Garcia-Penalosa, C., & Turnovsky, S. J. (2007). Growth, income inequality, and fiscal policy: What are the relevant trade-offs? *Journal of Money, Credit and Banking*, 39(2), 369-394.
- Goni, E., López, H., and Servén, L. (2011). Fiscal Redistribution and Income Inequality in Latin America. *World Development Journal*, 39(9): 1558-1569.
- Gupta, S., Clements, B., Baldacci, E. and Mulas-Granados, C., (2005). Fiscal policy, expenditure composition, and growth in low-income countries. *Journal of International Money and Finance*, 24(3), 441-463.
- Hasyim, S., Zuhilmi, M., & Amri, K. (2019). Is there a causality relationship between law enforcement, crime rates, and economic growth? An empirical evidence from western Indonesia, *Regional Science Inquiry* 11 (3), 95-109.
- Hekmatpour, P. (2020). Inequality and religiosity in a global context: Different secularization paths for developed and developing nations. *International Journal of Sociology*, 1-24. doi:10.1080/00207659.2020.1771013.
- Higgins, S., & Pereira, C. (2013). Analyzing the effects of fiscal policy on income inequality and poverty in Brazil
- Im, K.S., Pesaran, M.H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels, *Journal of Econometrics*, 115(1), 53-74.
- Jana-Masri, A., & Priester, P. E. (2007). The Development and Validation of a Qur'an-Based Instrument to Assess Islamic Religiosity: The Religiosity of Islam Scale. *Journal of Muslim Mental Health*, 2(2), 177-188. doi:10.1080/15564900701624436
- Jhingan, M. L. (2013). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Jordan, J. (2014). Religion and inequality: the lasting impact of religious traditions and institutions on welfare state development. *European Political Science Review*, 8(01), 25–48.
- Kanu, S.I & Ozurumba, B. A. (2014). Capital formation and economic growth in Nigeria, *Global Journal of Human-Social Science: Economics*, 14(4): 43-58.
- Keister, L. A., & Eagle, D. (2016). Religion and inequality: the role of status attainment and social balance processes, *Social Thought and Research*, 33, 141-171.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality, *The American Economic Review* 45, 1-28.
- Lam, K., & Mansouri, F. (2020). Beyond (mis)-recognition: Muslim youth and religiosity in Australia. *Journal of Youth Studies*, 1–16. doi:10.1080/13676261.2020.1766667.
- Levin, A., Lin, C.F., & Chu, C.S.J. (2002). Unit root test in panel data: Asymptotic and finite sample properties, *Journal of Econometrics*, 108, 1-24.
- Libanio, G. A. (2005). Unit roots in macroeconomic time series: theory, implications, and evidence. *Nova Economia*, 15(3), 145–176. doi:10.1590/s0103-63512005000300006.
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(s1), 631–652. doi:10.1111/1468-0084.0610s1631
- Makros, J., & McCabe, M. (2003). The relationship between religion, spirituality, psychological adjustment, and quality of life among people with multiple sclerosis. *Journal of Religion and Health*, 42(2), 143–159. doi:10.1023/A:1023681830716
- Matteo, L. D. (2015). All equal in the sight of God: Economic inequality and religion in the early twentieth century, *European Review of Economic History*, 20, 23-45.
- McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006). Religion and economy, *Journal of Economic Perspectives*, 20(2), 49–72.
- Moon, T.-W., Youn, N., Hur, W.-M., & Kim, K.-M. (2018). Does employees' spirituality enhance job performance? The mediating

- roles of intrinsic motivation and job crafting. *Current Psychology*. doi:10.1007/s12144-018-9864-0.
- Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalas, O. (2013). Joint determinants of fiscal policy, income inequality and economic growth. *Economic Modelling*, 30, 814 – 824.
- Murthy, V., & Okunade, A. (2018). Is the health care price inflation in US urban areas stationary? Evidence from panel unit root tests", *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 23 (44), 77-94. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-02-2017-0043>.
- Musa, A. (2015). Spiritual Beliefs and Practices, Religiosity, and Spiritual Well-Being Among Jordanian Arab Muslim University Students in Jordan. *Journal of Spirituality in Mental Health*, 17(1), 34–49. doi:10.1080/19349637.2014.957609.
- Naveed, A., & Wang, C. (2017). Can religion explain cross-country differences in inequality? A global perspective. *Social Choice and Welfare*, 50(3), 481–518. doi:10.1007/s00355-017-1093-1.
- Nazamuddin, B. S., & Amri, K. (2020). Does goods and services spendings reduce income inequality? A panel data evidence from Indonesia, *Regional Science Inquiry* 12 (1), 87-102.
- Ohlmann, P., & Hüttel, S. (2018). Religiosity and household income in Sekhukhune. *Development Southern Africa*, 35(2), 179–193. doi:10.1080/0376835x.2018.1426444.
- Pesaran, M. H. (2012). On the interpretation of panel unit root tests. *Economics Letters*, 116(3), 545–546. doi:10.1016/j.econlet.2012.04.049.
- Phillips, P.C.B., & Sul, D., (2003). Dynamic panel estimation and homogeneity testing under cross section dependence. *Econometrics Journal*, 6(1), 217-259.
- Pressman, S. (2000). *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Qayyum, U., Anjum, S. & Sabir, S. (2019). Religion and economic development: new insights. *Empirica* (2019). <https://doi.org/10.1007/s10663-019-09456-3>.
- Roebroeck, A. (2015). Granger Causality. *Brain Mapping*, 593–597. doi:10.1016/b978-0-12-397025-1.00337-7.

- Sabir, Yustika, A. E., Susilo., & Maskie, G. (2015). Local government expenditure, economic growth and income inequality in south Sulawesi province, *Journal of Applied Economics and Business*, 3(2), 61-73.
- Sameti, M., & Rafie, L. (2010). Interaction of income distribution, taxes and economic growth (The case of Iran and some selected east Asian countries), *Iranian Economic Review*, 14(25), 67-81.
- Shah, S. S., Jalil, A., & Shah, S. A. H. (2020). Growth effects of religion dependent social capital: An empirical evidence. *Social Indicators Research*. doi:10.1007/s11205-019-02253-2.
- Shin, I. (2012). Income inequality and economic growth. *Economic Modelling*, 29(5), 2049–2057.
- Solt, F., Habel, P., & Grant, J. T. (2011). Economic inequality, relative power, and religiosity. *Social Science Quarterly*, 92(2), 447–465. doi:10.1111/j.1540-6237.2011.00777.x.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom : Pearson Education Limited.
- Wang, Q., & Lin, X. (2014). Does religious beliefs affect economic growth? Evidence from provincial-level panel data in China, *China Economic Review* 31, 277–287.
- Woo, J. (2011). Growth, income distribution, and fiscal policy volatility, *Journal of Development Economics*, 96, 289–313.
- Zelekha, Y., Avnimelec, G., & Sharabi, E. (2014). Religious institutions and entrepreneurship, *Small Business Economics*, 42(4), 747-767.

TABULASI DATA PENELITIAN						
KAB KOTA	TAHUN	PDRB per kapita (Rp juta)	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Jumlah Mesjid per 10.000 pddk	Jumlah Pesantren per 20.000 pddk	Jumlah santri per 10.000 pddk
Aceh Tenggara	2010	12,988	0,297	12	5	190
Aceh Tenggara	2011	13,381	0,249	12	5	177
Aceh Tenggara	2012	13,766	0,235	13	5	135
Aceh Tenggara	2013	14,083	0,213	13	6	187
Aceh Tenggara	2014	14,308	0,246	13	6	182
Aceh Tenggara	2015	14,605	0,302	13	6	181
Aceh Tenggara	2016	14,926	0,317	13	7	182
Aceh Tenggara	2017	15,345	0,284	13	7	197
Aceh Timur	2010	20,084	0,254	8	4	303
Aceh Timur	2011	20,199	0,229	8	4	313
Aceh Timur	2012	20,289	0,254	8	4	323
Aceh Timur	2013	20,096	0,242	8	4	344
Aceh Timur	2014	19,551	0,243	9	5	359
Aceh Timur	2015	18,016	0,320	9	5	362
Aceh Timur	2016	17,472	0,243	9	6	363
Aceh Timur	2017	17,831	0,265	9	6	388
Aceh Tengah	2010	22,502	0,276	15	1	86
Aceh Tengah	2011	23,120	0,245	15	1	83
Aceh Tengah	2012	23,656	0,296	15	1	82
Aceh Tengah	2013	24,356	0,307	16	2	112
Aceh Tengah	2014	24,818	0,293	16	2	112
Aceh Tengah	2015	25,356	0,299	19	2	60
Aceh Tengah	2016	25,946	0,310	19	2	57
Aceh Tengah	2017	26,494	0,238	21	2	82
Aceh Besar	2010	20,022	0,292	4	5	439
Aceh Besar	2011	20,109	0,294	4	6	433
Aceh Besar	2012	20,451	0,325	4	7	411
Aceh Besar	2013	20,886	0,296	4	7	464
Aceh Besar	2014	21,279	0,289	4	8	559
Aceh Besar	2015	21,685	0,308	4	7	613
Aceh Besar	2016	22,086	0,292	4	7	601
Aceh Besar	2017	22,508	0,291	5	8	659
Aceh Utara	2010	32,205	0,240	6	8	401
Aceh Utara	2011	32,797	0,251	6	6	640
Aceh Utara	2012	32,662	0,314	6	6	549
Aceh Utara	2013	31,549	0,217	6	8	470
Aceh Utara	2014	30,012	0,250	6	8	849
Aceh Utara	2015	26,006	0,271	6	8	712
Aceh Utara	2016	25,601	0,270	6	8	542
Aceh Utara	2017	25,896	0,266	6	9	502

TABULASI DATA PENELITIAN						
KAB KOTA	TAHUN	PDRB per kapita (Rp juta)	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Jumlah Mesjid per 10.000 pddk	Jumlah Pesantren per 20.000 pddk	Jumlah santri per 10.000 pddk
Aceh Barat Daya	2010	17,655	0,213	11	5	278
Aceh Barat Daya	2011	17,756	0,258	11	6	330
Aceh Barat Daya	2012	17,699	0,240	11	4	247
Aceh Barat Daya	2013	17,741	0,251	11	4	297
Aceh Barat Daya	2014	17,579	0,262	12	4	285
Aceh Barat Daya	2015	17,836	0,271	12	4	292
Aceh Barat Daya	2016	18,308	0,276	12	4	292
Aceh Barat Daya	2017	18,808	0,246	12	4	270
Aceh Tamiang	2010	17,383	0,231	11	3	94
Aceh Tamiang	2011	17,281	0,244	11	3	167
Aceh Tamiang	2012	17,607	0,228	11	3	124
Aceh Tamiang	2013	18,162	0,214	11	3	81
Aceh Tamiang	2014	18,377	0,260	11	4	117
Aceh Tamiang	2015	18,448	0,275	11	4	101
Aceh Tamiang	2016	18,647	0,332	11	4	128
Aceh Tamiang	2017	19,118	0,295	11	5	165
Nagan Raya	2010	32,602	0,237	15	5	380
Nagan Raya	2011	32,658	0,228	15	5	371
Nagan Raya	2012	33,250	0,219	15	5	387
Nagan Raya	2013	33,687	0,226	16	6	392
Nagan Raya	2014	34,163	0,278	15	6	377
Nagan Raya	2015	34,965	0,274	15	7	433
Nagan Raya	2016	35,657	0,282	15	7	472
Nagan Raya	2017	36,371	0,231	15	7	484
Aceh Jaya	2010	18,426	0,285	15	8	246
Aceh Jaya	2011	18,766	0,283	15	8	281
Aceh Jaya	2012	19,128	0,283	15	8	268
Aceh Jaya	2013	19,307	0,268	15	8	393
Aceh Jaya	2014	19,151	0,305	15	8	393
Aceh Jaya	2015	19,800	0,340	16	8	436
Aceh Jaya	2016	20,295	0,305	16	9	446
Aceh Jaya	2017	20,691	0,287	17	9	464
Bener Meriah	2010	19,683	0,203	10	3	162
Bener Meriah	2011	20,112	0,230	10	3	147
Bener Meriah	2012	20,779	0,234	10	3	154
Bener Meriah	2013	21,406	0,225	11	3	143
Bener Meriah	2014	21,859	0,243	11	3	139
Bener Meriah	2015	22,442	0,275	11	3	173
Bener Meriah	2016	22,929	0,283	11	3	252
Bener Meriah	2017	23,418	0,213	11	4	293

TABULASI DATA PENELITIAN

KAB KOTA	TAHUN	PDRB per kapita (Rp juta)	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Jumlah Mesjid per 10.000 pddk	Jumlah Pesantren per 20.000 pddk	Jumlah santri per 10.000 pddk
Pidie Jaya	2010	13,186	0,215	4	6	420
Pidie Jaya	2011	13,443	0,247	4	6	565
Pidie Jaya	2012	13,763	0,220	4	7	576
Pidie Jaya	2013	14,038	0,243	4	8	529
Pidie Jaya	2014	14,277	0,225	4	8	564
Pidie Jaya	2015	14,653	0,238	4	8	550
Pidie Jaya	2016	14,919	0,249	5	8	569
Pidie Jaya	2017	15,445	0,220	5	9	607
Sabang	2010	24,135	0,243	6	3	111
Sabang	2011	24,732	0,238	6	3	133
Sabang	2012	25,356	0,267	6	3	115
Sabang	2013	26,106	0,305	6	3	82
Sabang	2014	26,730	0,285	6	3	81
Sabang	2015	27,487	0,271	6	3	103
Sabang	2016	28,472	0,299	6	3	112
Sabang	2017	29,885	0,247	7	3	117
Lhokseumawe	2010	52,878	0,275	3	2	404
Lhokseumawe	2011	50,445	0,301	3	3	345
Lhokseumawe	2012	50,065	0,454	3	3	387
Lhokseumawe	2013	48,453	0,322	3	4	302
Lhokseumawe	2014	43,863	0,334	3	4	309
Lhokseumawe	2015	34,221	0,324	3	4	353
Lhokseumawe	2016	33,099	0,291	3	4	335
Lhokseumawe	2017	33,136	0,291	3	4	339
Simeulue	2010	13,293	0,322	18	2	37
Simeulue	2011	13,520	0,333	18	2	37
Simeulue	2012	13,930	0,329	18	2	29
Simeulue	2013	14,332	0,268	18	2	64
Simeulue	2014	14,716	0,283	18	2	28
Simeulue	2015	15,089	0,355	18	2	29
Simeulue	2016	15,570	0,268	18	2	39
Simeulue	2017	16,057	0,307	20	2	38
Aceh Singkil	2010	11,733	0,271	13	1	235
Aceh Singkil	2011	12,009	0,243	13	1	205
Aceh Singkil	2012	12,219	0,228	13	1	234
Aceh Singkil	2013	12,488	0,276	13	1	159
Aceh Singkil	2014	12,715	0,314	13	1	199
Aceh Singkil	2015	12,916	0,334	13	1	308
Aceh Singkil	2016	13,200	0,307	13	1	310
Aceh Singkil	2017	13,406	0,321	14	1	338

TABULASI DATA PENELITIAN						
KAB KOTA	TAHUN	PDRB per kapita (Rp juta)	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Jumlah Mesjid per 10.000 pddk	Jumlah Pesantren per 20.000 pddk	Jumlah santri per 10.000 pddk
Aceh Selatan	2010	13,932	0,297	13	6	434
Aceh Selatan	2011	14,202	0,272	12	6	475
Aceh Selatan	2012	14,654	0,274	12	6	514
Aceh Selatan	2013	15,122	0,240	12	6	529
Aceh Selatan	2014	15,520	0,261	12	6	541
Aceh Selatan	2015	15,894	0,311	12	6	539
Aceh Selatan	2016	16,362	0,313	12	7	556
Aceh Selatan	2017	16,763	0,321	13	8	487
Aceh Barat	2010	25,572	0,307	16	7	409
Aceh Barat	2011	25,644	0,254	16	7	245
Aceh Barat	2012	25,261	0,297	16	8	290
Aceh Barat	2013	25,678	0,301	16	8	399
Aceh Barat	2014	25,934	0,310	16	9	441
Aceh Barat	2015	26,627	0,355	17	9	505
Aceh Barat	2016	26,832	0,325	17	10	423
Aceh Barat	2017	29,796	0,333	18	10	478
Pi d i e	2010	13,971	0,186	5	12	324
Pi d i e	2011	14,249	0,193	5	12	416
Pi d i e	2012	14,591	0,214	4	13	202
Pi d i e	2013	14,937	0,205	4	13	135
Pi d i e	2014	15,321	0,234	4	13	293
Pi d i e	2015	15,742	0,267	4	13	259
Pi d i e	2016	16,085	0,268	4	13	225
Pi d i e	2017	16,535	0,305	5	13	366
Bireuen	2010	18,167	0,237	4	6	523
Bireuen	2011	18,493	0,256	4	6	560
Bireuen	2012	18,819	0,265	4	6	624
Bireuen	2013	19,170	0,289	4	7	553
Bireuen	2014	19,299	0,288	4	7	657
Bireuen	2015	19,485	0,322	4	7	664
Bireuen	2016	19,899	0,279	4	7	555
Bireuen	2017	20,275	0,315	5	8	603
Gayo Lues	2010	17,370	0,235	13	3	219
Gayo Lues	2011	17,803	0,247	13	3	240
Gayo Lues	2012	18,412	0,250	14	4	213
Gayo Lues	2013	18,777	0,259	14	4	165
Gayo Lues	2014	19,155	0,284	14	5	286
Gayo Lues	2015	19,541	0,301	14	5	246
Gayo Lues	2016	19,959	0,308	15	5	136
Gayo Lues	2017	20,611	0,301	15	5	303

TABULASI DATA PENELITIAN						
KAB KOTA	TAHUN	PDRB per kapita (Rp juta)	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Jumlah Mesjid per 10.000 pddk	Jumlah Pesantren per 20.000 pddk	Jumlah santri per 10.000 pddk
Banda Aceh	2010	44,700	0,304	4	2	24
Banda Aceh	2011	45,827	0,306	4	2	43
Banda Aceh	2012	47,245	0,327	4	2	24
Banda Aceh	2013	48,442	0,285	4	2	18
Banda Aceh	2014	48,571	0,288	4	2	17
Banda Aceh	2015	50,838	0,328	4	2	29
Banda Aceh	2016	53,076	0,308	4	8	25
Banda Aceh	2017	53,635	0,314	5	9	25
Langsa	2010	17,438	0,317	4	1	75
Langsa	2011	17,783	0,372	4	1	219
Langsa	2012	18,217	0,336	4	2	257
Langsa	2013	18,662	0,339	4	2	236
Langsa	2014	19,088	0,337	4	2	288
Langsa	2015	19,559	0,356	4	2	261
Langsa	2016	20,089	0,359	4	2	264
Langsa	2017	20,649	0,342	4	2	263
Subulussalam	2010	13,263	0,312	13	3	145
Subulussalam	2011	13,612	0,249	14	3	174
Subulussalam	2012	13,869	0,281	14	2	181
Subulussalam	2013	14,334	0,322	14	3	219
Subulussalam	2014	14,739	0,300	14	3	239
Subulussalam	2015	15,087	0,373	14	3	243
Subulussalam	2016	15,461	0,329	14	3	273
Subulussalam	2017	15,920	0,330	16	3	295



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Khairul Amri, SE., M.Si
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	-
5.	NIDN	0106077507
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	010607750702000
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sungai Pagu, 6 Juli 1975
8.	E-mail	khairul.amri@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360005873
10.	Alamat Kantor	FEBI-UIN Ar-raniry, Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ilmu Ekonomi
13.	Program Studi	Ekonomi Syariah
14.	Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Syiah Kuala	Universitas Syiah Kuala	Universitas Syiah Kuala
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Manajemen	Ilmu Ekonomi	Ilmu Ekonomi
4.	Tahun Lulus	2001	2010	Tahap disertasi

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2020	Analisis Religiusitas Ke-islaman (islamic Religiosity), Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan (studi Empiris Kabupaten Kota Di Aceh)	DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
2.	2017	Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal (penelitian Empiris Di Kota Banda Aceh) Kluster	DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2017
3.	2016	Preferensi Nasabah Memilih Produk	DIPA UIN Ar-

	Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh	Raniry B. Aceh Tahun 2017
--	---	---------------------------

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Pengabdian Kepada masyarakat di Takengon	DIPA UIN Ar-raniry
2.	2018	Pengabdian Kepada masyarakat di Tapak Tuan	DIPA UIN Ar-raniry

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Tahun	url
1.	Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia	Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman 8 (1), 1-18	2020	http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif
2.	Apakah pendapatan perempuan dapat mengurangi kemiskinan? Bukti data panel di Indonesia	Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 8 (1), 64-71	2020	http://ejournal.polbeng.ac.id/
3.	Effect of inflation on total deposits and financing of sharia commercial banks: A monthly data evidence from Indonesia	Regional Science Inquiry 12 (1), 103-114	2020	http://www.rsijournal.eu/
4.	Does goods and services spendings reduce income inequality? A panel data evidence from Indonesia	Regional Science Inquiry 12 (1), 87-102	2020	http://www.rsijournal.eu/
5.	Infrastruktur jalan dan kesempatan kerja di Indonesia: Pendekatan vector autoregressive	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 17 (1), 85-97	2020	https://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/index
6.	Pengaruh Zakat dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat	Jurnal Al-Muzara'ah 7 (2), 57-70	2019	https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah

	Kemiskinan di Aceh			
7.	Apakah Infrastruktur Jalan Mempengaruhi Ekspor? Pendekatan Vector Autoregressive	Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2), 166-173	2019	http://ejournal.polbeng.ac.id/
8.	Is there a causality relationship between law enforcement, crime rates, and economic growth? An empirical evidence from western Indonesia	Regional Science Inquiry 11 (3), 95-109	2019	http://www.rsijournal.eu/
9.	Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 5 (3), 231-244	2019	https://jurnal.stie-aas.ac.id
10.	Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh	Jurnal Manajemen dan Sains 4 (2), 386-391	2019	http://jmas.unbari.ac.id
11.	Infrastruktur Jalan, Belanja Modal dan Kesempatan Kerja: Bukti Data Panel Kabupaten Kota di Aceh	Jurnal Manajemen dan Sains 4 (2), 334-341	2019	http://jmas.unbari.ac.id
12.	Is there a causality relationship between local tax revenue and regional economic growth? A panel data evidence from Indonesia	Regional Science Inquiry 11 (1), 73-84	2019	http://www.rsijournal.eu/
13.	The macroeconomic impact of regional minimum wages: A cross-province data evidence from Indonesia	Regional Science Inquiry 10 (3), 163-176	2018	http://www.rsijournal.eu/
14.	Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank	Jurnal Samudra Ekonomi dan	2018	https://ejournalunsam.id/index.php/jseb

	Aceh Syariah di Kota Banda Aceh	Bisnis 9 (1), 31-41		
15.	Is There Causality Relationship between Export and Employment: A Time Series Data Evidence from Indonesia	International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 7(2), 86-99	2018	https://hrmars.com/pages/detail/IJAREMS
16.	Is There Causality Relationship between Economic Growth and Income Inequality? Panel Data Evidence from Indonesia	Eurasian Journal of Economics and Finance 6 (2), 8-20	2018	https://eurasianpublications.com/Eurasian-Journal-of-Economics-and-Finance
17.	Indek Harga Konsumen dan Belanja Modal terhadap Indek Perilaku Korupsi	SI - MEN (Akuntansi dan Manajemen) 8 (1), 49-65	2017	www.sties-aceh.ac.id
18.	Pengaruh Pembentukan Modal dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Economac: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi 1 (1), 1-16	2017	http://ejournal.unp.ac.id/index.php/Economac/index
19.	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Data Panel 8 Provinsi di Sumatera	Jurnal EMT KITA 1 (1), 1-11	2017	http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/index

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal (Penelitian Empiris Di Kota Banda Aceh)	2018	Laporan Penelitian	000123661
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,



Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 01077507